

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

Bagian ini, akan menyajikan teori-teori yang dibangun berdasarkan pada konsep *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* sebagai dasar dalam pijakan pada penelitian ini. *Grand theory* yang dibangun pertama kali dalam penelitian ini adalah teori- teori Akuntansi keuangan syariah yang merupakan bangunan tertinggi dalam pencapaian bangunan teori dalam penelitian disertasi ini. Akuntansi keuangan syariah dipilih menjadi *grand theory* adalah lebih didasarkan pada kerumpunan ilmu akuntansi keuangan yang menjadi induk dari disiplin ilmu akuntansi secara keseluruhan. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah akuntansi manajemen syariah. Akuntansi manajemen syariah yang merupakan bagian dari nilai akuntansi manajemen merupakan salah satu turunan rumpun ilmu dari nilai akuntansi keuangan pada *grand theory* diatas. Karena hasil output dari nilai akuntansi manajemen adalah berupa akuntansi yang didasarkan pada pengambilan keputusan – keputusan internal dalam pengembangan entitas atau organisasi pada masa yang akan datang. Sedangkan *applied theory* dalam penelitian ini adalah, Penganggaran, *Balance scorecard* Pendampingan Nasabah, dimana dari ketiga teori tersebut dibangun dan dilahirkan berdasarkan dari pengambilan keputusan manajemen organisasi sebagaimana yang dihasilkan dan diterapkan dari bangunan teori akuntansi manajemen syariah.

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bisnis, karena semua keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, keberadaan informasi memegang peranan penting, mulai dari penemuan masalah hingga pemantauan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Jika proses ini terkait dengan operasi perusahaan, informasi akuntansi ini akan diperlukan. Informasi akuntansi tidak hanya berguna bagi pemilik perusahaan, tetapi juga menjadi sumber informasi

utama bagi manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan informasi bagi investor untuk memilih investasi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, meringkas, mengolah, mengklasifikasi, dan menyajikan data seluruh transaksi yang terjadi, dilanjutkan dengan memposting data tersebut ke buku besar, berlanjut sampai tahap pembuatan laporan dan melaporkannya dalam kaitan dengan keuangan perusahaan, suatu bisnis, maupun instan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak eksternal perusahaan, misalnya investor, kreditor, pemerintah, dan lain –lain yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.(Charles T. Horngren, 2007). Untuk selanjutnya akuntansi yang kita kenal selama ini akan penulis sebut dengan istilah akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional adalah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan yang cenderung menggunakan logika atau rasionalisme ekonomi yang meliputi prinsip-prinsip individualisme, kepentingan pribadi, dan maksimalisasi keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dari akuntansi konvensional menjadi sebuah standar utama bagi perusahaan. Kita semua tahu bahwa keuntungan adalah suatu hal yang pastinya diinginkan oleh pebisnis atau pemilik perusahaan, sehingga dengan penerapan akuntansi konvensional yang lebih mengandalkan logika, hal tersebut dirasa lebih sesuai. Bisa dibilang bahwa konsep akuntansi konvensional merupakan sistem yang sangat mementingkan para pemilik modal atau biasa disebut sebagai para kapitalis. Definisi ini cukup sesuai dengan tujuan akuntansi konvensional yang fokus pada tujuan ekonomi saja.(Rizeki, 2022)

Akuntansi diperkirakan telah dipergunakan sejak dari zaman pra masehi, karena masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Di Indonesia, jenis akuntansi yang sudah dikenal selama ini sudah mengalami perkembangan dengan seringnya digunakan oleh pihak swasta. Dapat dikatakan bahwa pihak swasta memiliki peranan yang penting dan berpengaruh pada perkembangan akuntansi konvensional. Menurut para ilmuwan Barat, akuntansi pertama kali dirumuskan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di

Italia dengan bukunya yang berjudul ‘*Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions)*’, tetapi beberapa fakta yang ditemukan oleh para peneliti membuktikan bahwa Islam telah mencapai puncak kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan, beberapa abad sebelum terbitnya buku Pacioli yang hidup di akhir abad ke 13, sedangkan Eropa pada saat itu masih dalam masa-masa kegelapan (*dark age*) sehingga perkembangan ilmu pengetahuan berjalan statis dan tidak ada kemajuan berarti. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan hal yang mengada-ada kiranya bila dikatakan bahwa akuntansi, bukanlah lahir dari Barat, melainkan hasilpemikiran dari para ilmuwan muslim dan sudah dipraktikkan secara umum oleh para pedagang muslim yang melakukan ekspedisi dagang jauh sampai ke negara-negara Eropa pada masa itu.

Jauh sebelum Luca Pacioli hidup di akhir abad ke 13, istilah akuntansi secara tersirat telah difirmankan Allah Subhanahu Wata’ala di dalam Al Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤءًا
 SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya....

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*). Dalam Al Quran jugadisampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangandikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. (Khaddafi et al., 2016). Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain adalah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 :



 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِيَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

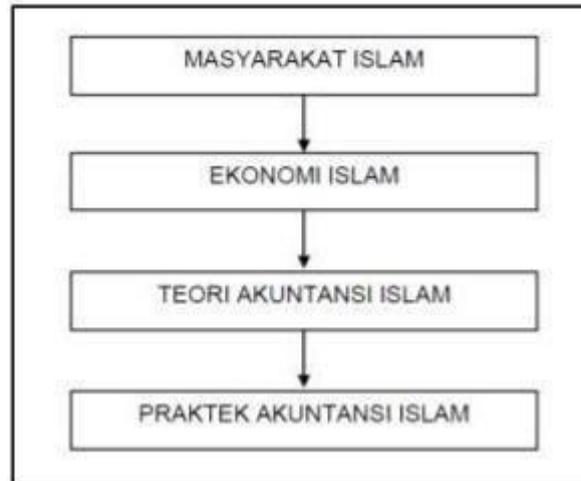
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan

dijelaskan dalam Ilmu Auditing.(Chapra, 2000)

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba, hasiba, muhasabah*, atau *wazan* yang lain adalah *hasaba, hasban, hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “*hisab*” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, pengikhtisaran sampai menghasilkan laporan untuk pengguna sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba, maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanyadata finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalansesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat. Konsep akuntansi syariah menurut Gambling dan Karim, lahir dari proses yang saling berhubungan antara masyarakat Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam, kemudian mereka pasti menerapkan akuntansi Islam.(Harahap, 1997). Konsep akuntansi syariah menurut Gambling dan Karim dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1. Konsep Akuntansi Syariah

Menurut Gambling dan Karim, dalam akuntansi syariah, kegiatan muamalah harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. Proses akuntansi mengikuti prinsip – prinsip akuntansi dan penekanannya harus kepada keadilan, dalam arti, output yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan, dan kejujuran (objektivitas), sebagaimana halnya hakikat dan keinginan dalam ajaran Islam. (Triwiyono dan As’udi, 2001)



Gambar 2.2. Proses Akuntansi Syariah

. Ada 3 prinsip dari akuntansi syariah yaitu :

(1). Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

(2). Prinsip Keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat *Al-Baqarah*, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 200 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

(3). Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat

menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan. (Khaddafi et al., 2016)

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya, namun akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional, karena akuntansi syariah mengandung unsur syariah didalamnya yang menjadi dasar pijakan dalam meletakkan struktur teori akuntansi syariah. Syariah merupakan seperangkat aturan Allah SWT yang diturunkan dalam bentuk akidah, akhlak, dan hukum amaliah. Ketiga pondasi tersebut merupakan bagian dari agama Islam. Posisi akidah merupakan posisi yang paling tinggi disusul kemudian dengan hukum amaliah dan akhlak. Akidah atau *I'tiqadiyah* ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah SWT. Amaliah adalah Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT secara lahiriah. Etika atau *Khuluqiyyah* adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan

bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat, sehingga akuntansi harus dianggap sebagai salah satu *derivasi*/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.(Khaddafi et al., 2016). Adapun persamaan kaidah antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1). Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. (2). Prinsip penahanan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
- (3). Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal.
- (4). Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.
- (5).Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost*.
- (6). Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan.
- (7). Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan

Adapun perbedaan kaidah antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah sebagai berikut :

- (1). Dari segi dasar hukum , akuntansi syariah bersumber dari Alqur'an dan sunnah, sedangkan akuntansi konvensional bersumber dari hukum bisnis modern
- (2). Dasar tindakan pada akuntansi syariah adalah Keberadaan hukum Allah (Keagamaan) sedangkan akuntansi konvensional adalah rasionalisme ekonomis (*Sekuler*)
- (3). Dari segi tujuan, akuntansi syariah bertujuan mendapatkan keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional maksimalisasi keuntungan
- (4). Orientasi dari akuntansi syariah adalah kemasyarakatan sedangkan akuntansi konvensional adalah individual atau kepada pemilik
- (5). Tahapan operasional pada akuntansi syariah dibatasi dan tunduk ketentuan syariah sedangkan pada akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali ada pertimbangan ekonomis.(Khaddafi et al., 2016)

a. Transaksi Syariah

Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Transaksi menurut Islam adalah segala transaksi yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai hukum Islam yang berlaku seperti yang tertuang dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadist. Di dalam sistem transaksi syariah, yang paling penting adalah adanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya akad tersebut maka transaksi yang dilakukan tidak dibenarkan mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Adapun asas dalam transaksi menurut syariah adalah dalam melakukan transaksi haruslah didasarkan pada rasa saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi (*tahaluf*). Dalam sistem ekonomi dengan paradigma Islam, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 transaksi yaitu transaksi halal dan haram. (Zulkifli Sunarto, 2003). Pada saat transaksi, ada istilah akad dalam hukum Islam yang dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah "perjanjian". Kata akad berasal dari kata *al'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antarapenyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Mas'adi dan Ghufroon., 2002) Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul 'aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. (Shomad, 2010). Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.

Kegiatan usaha pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama

dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. Menurut Ibnu Khaldun tingkatan kegiatan usaha manusia dimulai dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam, misalnya pertanian, perikanan dan pertambangan. Tingkatan berikutnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan hasil rekayasa manusia atas hasil sumber daya alam. Dilanjutkan dengan kegiatan perdagangan yang secara alami timbul akibat perbedaan penawaran-permintaan dari hasil sumber daya alam maupun hasil rekayasa manusia pada suatu tempat. Akhirnya adalah kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai kemewahan. Manusia mempunyai keterbatasan dalam berusaha, oleh karena itu sesuai dengan fitrahnya, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:

- (1). Kerjasama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui ikatan atau akad Mudharabah maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad Musyarakah.
- (2). Kerjasama dalam perdagangan, dimana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapat bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai.
- (3). Kerjasama dalam penyewaan asset, dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan asset.

b. Kerangka Dasar Laporan Keuangan Syariah

Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar

yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual ini diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Tujuan kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

- (1). Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya.
- (2). Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- (3). Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- (4). Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. (Khaddafi et al., 2016)

Berdasarkan IAI (2007 paragraf 9) pemakai laporan keuangan meliputi:

- (1). Investor sekarang dan potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan deviden. Akuntansi Syariah.
- (2). Pemilik dana qardh. Pemilik dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- (3). Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka

untuk Akuntansi Syariah mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.

- (4). Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
- (5). Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- (6). Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
- (7). Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- (8). Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
- (9). Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
- (10). Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

- (11). Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan secara syariah tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1). Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- (2). Informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan: dan penggunaannya;
- (3). Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
- (4). Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial perbankan syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai laporan tersebut. Walaupun demikian, laporan keuangan tidak dapat menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak

diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi: keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perbankan syariah atau keputusan untuk menandatangani kembali atau mengganti manajemen. (Ilyas Rahmat, 2016).

Informasi yang dihasilkan dalam Laporan keuangan akan berguna bagi pemakai apabila laporan tersebut memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut

(1). Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan dari entitas syariah adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Dengan demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

(2). Relevan

Agar bermanfaat, informasi yang ditampung dalam laporan keuangan entitas syariah harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Relevansi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan

yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (ommission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisahan dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialistis.

(3). Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang ada dalam laporan keuangan entitas syariah juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur, transaksi serta peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

(4). Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan

secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan padastandar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding. Entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

Unsur – unsur laporan keuangan syariah dapat digolongkan sebagai berikut :

- (1). Sesuai karekteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi :
 - a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil
 - b. Laporan posisi keuangan (neraca);
 - c. Laporan laba rugi
 - d. Laporan arus kas;
 - e. Laporan perubahan ekuitas;
- (2). Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.
- (3). Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan

tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007)

.c. Filosofi Akuntansi Syariah

Filosofi adalah studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Filosofi memberi pandangan dan menyatakan secara tidak langsung mengenai sistem keyakinan dan kepercayaan. Setiap filosofi individu akan dikembangkan dan akan mempengaruhi perilaku dan sikap individu tersebut. Seseorang akan mengembangkan filosofinya melalui belajar dari hubungan interpersonal, pengalaman pendidikan formal dan informal, keagamaan, budaya dan lingkungannya. Filosofi hidup hampir berkaitan dengan prinsip hidup. Semua orang yang masih eksis mempunyai pegangan hidup, tujuan hidup, prinsip hidup maupun filosofi hidup. Tentunya hal ini cukup berbeda di antara satu dengan lainnya dalam menyikapinya. Karena setiap orang itu tidak sama, setiap orang itu unik, setiap orang merupakan makhluk berakal yang memiliki pilihan masing-masing.

Beberapa bidang kajian filsafat yaitu konsep ontologi dan epistemologi secara sepintas seperti tidak memiliki hubungan langsung dengan penelitian dalam bidang akuntansi ataupun atau praktik akuntansi. Namun ternyata, kedua konsep tersebut memiliki kegunaan bagi akuntan karena beberapa alasan. Pertama, konsep ontologi dan epistemologi membantu akuntan dalam mengembangkan konsep akuntansi. Crotty (1998) berpendapat bahwa realitas adalah interaksi antara subjek dan objek. Dalam akuntansi, interaksi tersebut terjadi antara penyusun standar sebagai subjek dan aktivitas organisasi serta aturan akuntansi sebagai objek. Dalam interaksi tersebut, nilai-nilai yang dimiliki atau dianut oleh pembuatstandar akan sangat mempengaruhi standar akuntansi “yang diterima secara umum”. Morgan (1998) berargumentasi bahwa akuntansi lebih dekat dengan proses membangun realitas daripada menangkap realitas secara objektif. Dengan menyadari bahwa praktik akuntansi saat ini bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, hal tersebut dapat membuka peluang bagi para penggiat akuntansi untuk meningkatkan aturan dan praktik akuntansi menjadi lebih baik untuk bisa menangkap realitas aktivitas organisasi dengan lebih baik.

Kedua, Crotty (1998) mencatat bahwa budaya merupakan kerangka yang terdapat dalam masyarakat. Terkait dengan proses penyusunan standar akuntansi, budaya yang dimiliki oleh para pembuat standar merupakan kerangka kerja bagi mereka untuk melihat aktivitas organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Chua (1986) menyatakan bahwa hukum sosial adalah produk yang dihasilkan dari proses dominasi. Berdasarkan kedua argumentasi diatas, akuntansi dapat dilihat sebagai hasil dominasi dari budaya pembuat standar. Kesadaran atas konsep epistemologi akan membantu akuntan untuk memberikan masukan membangun terhadap praktik akuntansi saat ini. Selain itu, kesadaran tersebut dapat mendorong akuntan untuk menjadi peneliti-peneliti yang mengembangkan akuntansi sebagai produk baru berdasarkan keterbatasan dan karakteristiknya. Hal ini juga dapat membantu para akuntan untuk memikirkan proses konvergensi standar akuntansi, karena proses konvergensi ini dapat dilihat sebagai proses dominasi suatu budaya sedangkan budaya setiap negara kemungkinan akan berbeda. Ketiga, menyadari bahwa akuntansi bukanlah merupakan kebenaran yang mutlak dapat mendorong kemungkinan adanya peraturan dan perlakuan akuntansi yang baru dan dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Dengan demikian, masalah yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan praktik akuntansi arus utama dapat dipelajari dengan konsep tambahan yang dapat berupa hasil pemikiran dari perspektif yang berbeda.

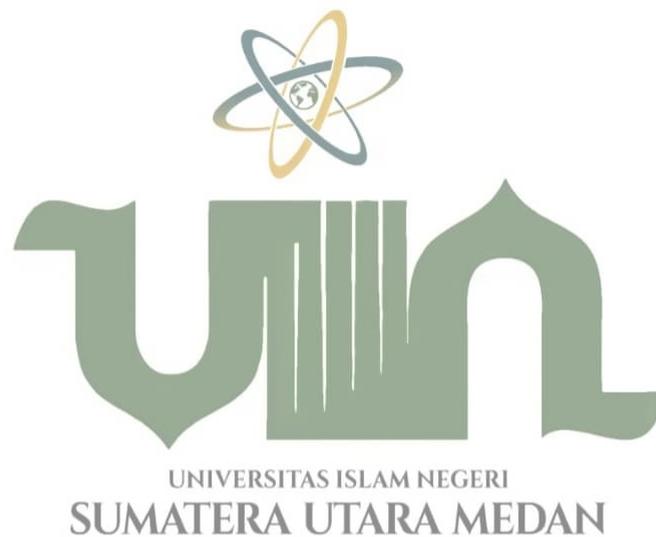
Secara garis besar, konsep ontologi dan epistemologi adalah konsep yang dapat bermanfaat untuk praktik akuntansi. Kedua konsep tersebut dapat membuka pintu peluang bagi para akuntan untuk menciptakan praktik akuntansi yang lebih baik, untuk melihat dan menilai praktik akuntansi dan proses konvergensinya secara kritis, dan memperkaya penelitian akuntansi. Namun, untuk membuka peluang tersebut, dibutuhkan penerimaan dan keterbukaan atas adanya perspektif-perspektif dan ide-ide baru dalam melihat aturan dan praktik akuntansi yang ada saat ini.

Filosofi lain dari akuntansi adalah bahwa perkembangan akuntansi merupakan respon dan evaluasi terhadap perkembangan bisnis (*accounting follows the business*). Dalam konteks ini, akibat dari adanya perkembangan lingkungan (bisnis), akuntansi pun mengalami perkembangan karena respon dan evaluasi

terhadap perkembangan bisnis tersebut. Akuntansi mengalami perkembangan, bukan saja meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tetapi juga akuntansi sosial, akuntansi sumber daya manusia, dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi sosial merupakan *accounting treatment* atas akuntabilitas perusahaan dalam tanggung jawab sosial mereka, akuntansi sumber daya manusia merupakan *accounting treatment* atas sumber daya manusia tidak hanya sebagai *cost* tetapi *asset*. Sedangkan akuntansi keperilakuan mengkaji efektivitas perilaku dalam sistem akuntansi dan sebaliknya pengaruh sistem akuntansi (keuangan dan manajemen) terhadap perilaku. (Alim, 2011).

Kemunculan akuntansi syariah membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan utama *al falah* yaitu memasuki sorga *jannatun naim*” Konsep Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki konsepsi yang berbeda. Imam Al Ghazali seorang hujjatul Islam, ahli fiqh sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam bermuara pada *maqashid syariah* antara lain melindungi/meningkatkan iman (agama), melindungi jiwa dan akal, dan keturunan, serta harta. Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas (ibadah maupun muamalah), sedangkan perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersifat derivasi peningkatan iman dan perlindungan akal dan jiwa. (Chapra, 2000). Konsepsi akuntansi (sebagai bagian dari muamalah) syariah harus bermuara pada *maqashid syariah* untuk memenuhi akuntabilitas hamba Allah yang dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab mereka terhadap kewajiban zakat. Menempatkan zakat sebagai tujuan utama informasi akuntansi adalah hal yang paling logis dalam pandangan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gambling dan Karim, bahwa tujuan informasi akuntansi untuk tujuan zakat lebih menekankan pada aset-kewajiban (neraca) daripada pendapatan-biaya (laporan laba rugi). (Adnan, 1997). Tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan

hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Atas dasar itu, maka pemahaman atas fiqh zakat juga penting bagi akuntan dan setiap usaha seharusnya menyusun neraca zakat. (Syahatah, 2001), karena setiap harta ada bagian hak (zakat/sedekah) untuk orang/pihak lain. Dengan tujuan zakat / sedekah maka akuntansi syariah akan memenuhi *maqashid syariah* karena zakat khususnya merupakan manifestasi iman untuk penyucian bukan hanya harta, tetapi juga jiwa, dan akal atas penguasaan suatu harta, seperti firman Allah SWT dalam surah At Taubah ayat 103 sebagai berikut :



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Manifestasi penyucian jiwa tersebut bukan zakat saja tapi untuk semua bentuk peredaran harta seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 7 :

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

2. Akuntansi Manajemen Syariah

Sebuah entitas akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila dikelola dengan cara yang tepat. Para pengelola perusahaan, seperti, dewan komisaris, dewan direktur, dan para manajer, tergabung ke dalam suatu kelompok yang disebut manajemen perusahaan. Manajemen inilah yang bertanggungjawab untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen dilakukan melalui aktivitas- aktivitas berikut ini :

1). Perencanaan (planning).

Manajemen organisasi menentukan tujuan serta mengidentifikasi strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

2). Pengorganisasian (organizing).

Pengorganisasian meliputi pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh

perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang ditetapkan, termasuk di dalamnya mengembangkan struktur perusahaan untuk membagi berbagai tanggungjawab, tugas dan wewenang pada masing-masing bagian.

3). Pengarahan dan Pemberian Motivasi (*directing/leading*).

Proses ini melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas organisasi, antara lain melalui pemberian tugas kepada karyawan, penyelesaian masalah rutin, penyelesaian konflik dan komunikasi efektif.

4). Pengendalian (*controlling*).

Pengendalian berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajerial ini memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan rencana.

Akuntansi manajemen (*Management Accounting*) ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisa, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi tentang informasi yang membantu masing-masing eksekutif untuk memenuhi suatu tujuan organisasi. (Charles T. Horngren [et al.], 1999). Menurut Baldric Siregar, Akuntansi manajemen (*management accounting*) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. (Siregar Baldric, 2017). Pendapat Hansen dan Mowen bahwa akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang lebih berorientasi pada pengambilan keputusan internal dan dengan sengaja memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada manajer perusahaan (*internal manager / user*). Akuntansi manajemen lebih dikenal dengan nama akuntansi internal berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi dan melaporkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen memberikan informasi untuk

2 (dua) tujuan, yaitu : (1). Pelaporan rutin internal kepada manajer untuk memberi informasi dan mempengaruhi perilaku – perilaku yang berkaitan dengan manajemen biaya dan perencanaan serta pengendalian operasi; (2).Pelaporan yang tidak rutin atau khusus kepada manajer untuk keputusan strategik dan taktis untuk masalah – masalah, seperti menetapkan harga produk atau jasa, dan memformulasikan kebijakan secara keseluruhan dan perencanaan jangka panjang.(Hansen dan Mowen, 2011). Adapun tujuan akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi kepada pihak internal, yaitu manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan, informasi tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang tidak di publikasikan untuk pihak eksternal. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi juga memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen secara spesifik menganalisis biaya – biaya yang berhubungan dengan proses bisnis perusahaan untuk menghasilkan dan menetapkan harga produk dan manfaat – manfaat yang berhubungan dengan pengambilan keputusan hingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertambahan modal (*capital*) dan beban – beban operasi.

Akuntansi manajemen yang kita kenal selama ini lahir dari rahim kapitalisme, sehingga membawa konsekuensi logis, bahwa akuntansi manajemen menyanggah sifat-sifat kapitalisme di dalamnya yang terwujud dalam teknik-teknik aplikasinya baik dalam bentuk dipengaruhi maupun memengaruhi penggunaannya. Akuntansi manajemen, sebagai bagian dari akuntansi, dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang dalam pengembangan dan pemanfaatannya dipengaruhi oleh *worldview* di lingkungan dimana diciptakan dan dikembangkan. Akuntansi manajemen saat ini yang lahir dari peradaban barat tentunya dipengaruhi oleh *worldview* kapitalis yang bersifat egoistik, dan materialistik dan individualistik.(Triyuwono, 2012). Kenyataan ini sejalan dengan pandangan *positivisme* dalam keilmuan, yang secara keilmuan akuntansi manajemen dikembangkan di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, bahwa *positivisme* telah memberikan “jasanya” pada penyelesaian masalah manusia di dunia dan telah men-

Akuntansi manajemen syariah merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen dengan

berdasarkan asumsi – asumsi dengan tujuan organisasi, asumsi perilaku partisipan, dan asumsi- asumsi lainnya sesuai dengan kepatuhan dan kesesuaian prinsip – prinsip syariah sebagai tuntunan Allah SWT. Asumsi – asumsi tersebut tidak bisa lepas dari akuntansi syariah, dimana dari asumsi tersebut bahwa akuntansi manajemen syariah mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan mengendalikan dalam membuat keputusan manajemen bisnis dengan nilai – nilai syariah.(Sonhaji, 2013).

Dalam menjalankan fungsinya, manajemen memerlukan alat bantu yang dapat menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan. Salah satu alat bantu ini adalah Sistem akuntansi manajemen/SAM yang dirancang oleh akuntan. Dalam situasi lingkungan yang terus berubah dan sulit diprediksi, akuntan, sebagai perancang SAM menggunakan pandangannya dalam memutuskan bagaimana SAM dibangun dan informasi apa saja yang sebaiknya disajikan kepada manajemen.(Caplan, 1978) Dengan demikian, sebagai seperangkat pengetahuan yang mendasari aplikasi SAM, akuntansi manajemen telah mendominasi perannya di aktivitas perencanaan, pengevaluasian dan pengambilan keputusan serta pengendalian. Sebagai suatu sistem informasi, Akuntansi Manajemen menghasilkan informasi untuk pemakai. Akuntansi manajemen dapat dianggap sebagai alat. Layaknya sebuah alat, tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana akuntansi manajemen dibangun dan diterapkan. Salah satu aspek lingkungan dimaksud adalah berkaitan dengan keperilakuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih mengacu pada hasil dalam bentuk finansial atau laba perusahaan. Secara makro dapat dideteksi bahwa dari kejadian akhir-akhir ini berkenaan dengan skandal perusahaan besar yang merekayasa informasi untuk kecurangan, ternyata pandangan modern pun belum menghasilkan hasil yang baik. Justru pandangan modern, yang sejalan dengan pandangan kapitalis, menjadikan “jalan mulus” bagi akuntansi, termasuk akuntansi manajemen, bagi fenomena kejahatan ekonomi yang terjadi melalui perrekaan di sistem akuntansi. Gambaran mengkhawatirkan kapitalisme telah menjadi sorotan beberapa ahli, dimana akuntansi manajemen dijadikan sebagai salah satu alat yang dikembangkan dan digunakan untuk mendukung kapitalisme. (Sonhaji,

2013). Baik Teori Organisasi Tradisional (TOT) maupun Teori Organisasi Modern (TOM) yang merasuk ke akuntansi manajemen telah menimbulkan perilaku disfungsional dan gagal membuat perilaku bisnis yang lebih humanis, sehingga diperlukan dekonstruksi asumsi keperilakuan TOT dan TOM di akuntansi manajemen konvensional dengan yang berdasar pada *worldview* Islam. Ini perlu dilakukan karena fenomena kejahatan ekonomi dan bisnis banyak dipengaruhi oleh konsep dan prinsip yang tidak lagi memadai bagi pembangunan kehidupan kemanusiaan yang lebih baik dan humanis, apalagi yang lebih spiritual. Dengan demikian adalah rasional jika tindakan perbaikan adalah dengan menggali nilai-nilai yang lebih baik dan lebih spiritual sebagai landasan praktik bisnis dan akuntansi. Nilai-nilai dimaksud, *worldview* Islam dapat digali dari nilai-nilai Islami. dan moral-etis.



Gambar 2.3. Bangunan Akuntansi Manajemen Syariah melalui Asumsi Dasar Keperilakuan yang Sesuai dengan Worldview Islam

Berikut ini adalah asumsi – asumsi dasar yang telah disusun oleh (Sonhaji, 2013) adalah sebagai berikut :

- (1). Asumsi-Asumsi Berkaitan dengan Tujuan Organisasi sebagai berikut :
 - a. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan orang-orang di dalamnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang harus tunduk sepenuhnya pada-Nya, sehingga tujuannya harus sesuai dengan petunjuk-Nya.
 - b. Di antara banyak petunjuk-Nya, yang menjadi tujuan utama manusia dalam Islam adalah bertemu Allah (*liqo'*) melalui amal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apa pun jua (QS: Al Kahfi[18]: 110). Ini disebut tujuan hakiki manusia.
 - c. Kaidah baku dalam Islam, suatu tujuan yang baik harus dijalankan dengan cara dan sarana yang baik juga. Sebagai sarana mencapai tujuan yang mulia, organisasi harus memiliki tujuan yang merupakan akspresi dari tujuan yang mulia tersebut.
 - d. Karena sesuai dengan petunjuk Allah SWT, tujuan utama perusahaan, sebagai ekspresi tujuan partisipan di dalamnya, sebaiknya tidak berubah, karena tujuan ini melampaui dari sekedar maksimalisasi laba dan kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan ini melampaui kehidupan di dunia itu sendiri.
 - e. Menghadapi dunia yang sangat kompleks dan tidak pasti serta kuatnya godaan untuk menyimpang, maka anggota organisasi harus tetap mengacu pada tujuan utama dan pencapaiannya yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT.
 - f. Tujuan pribadi masing-masing individu atau tujuan “lokal” dalam organisasi harus diselaraskan dengan tujuan utama mulia organisasi. Harus ada keyakinan bahwa setiap upaya baik akan memperoleh imbalan yang setimpal bahkan lebih besar dari sekedar imbalan materi. Partisipan organisasi tidak boleh terjebak oleh tujuan sesaat dan lebih rendah dari tujuan utama hidup yang hakiki.

- (2). Asumsi-Asumsi Berkaitan dengan Perilaku Partisipan :
- a. Perilaku manusia untuk mencapai apa yang diinginkan, termasuk pengambilan keputusan, harus disemangati dan ditujukan untuk memperoleh ridho Allah SWT. Ini harus menjadi motivasi utama seorang muslim.
 - b. Manusia dalam organisasi akan dihadapkan pada masalah dan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan harus selalu berpihak pada yang benar. Dalam proses mengambil keputusan harus didahului memohon petunjuk Allah, dimusyawarahkan. Jika sudah diambil keputusan harus tawakal kepada Allah dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
 - c. Pada hakekatnya manusia muslim termotivasi oleh tujuan tunggal (ridho Allah), dan ini harus tetap sepanjang waktu. Sedangkan tujuan lainnya, psikologis, sosial, dan ekonomi dicapai dalam rangka mencapai tujuan tunggal utama tersebut. Adanya godaan dan lemahnya penghayatan terhadap ajarannya serta sifat hati yang "naik turun", membuat manusia mudah tergoda untuk menyimpang dari tujuan mulia.
 - d. Pekerjaan adalah aktivitas mulia yang bernilai ibadah. Jika dilaksanakan dengan niat ibadah akan menerima kemuliaan, sedangkan jika tidak ditunaikan dengan amanah akan memperoleh murka Allah SWT. Oleh karena itu sengaja tidak melakukan pekerjaan atau menghindar dari pekerjaan termasuk perbuatan dosa.
 - e. Keputusan individu untuk bergabung dengan organisasi didasarkan pada menjalankan amanah untuk berkarya dan individu harus memberikan yang terbaik, karena bukan saja akan memperoleh imbalan dari organisasi namun juga akan memperoleh balasan dari Allah dengan yang lebih baik.
 - f. Keputusan individu untuk menyumbangkan dan tidak usahanya yang produktif harus didasarkan pada apakah organisasi dijalankan sesuai dengan tujuan utama yang mulia atau tidak.
 - g. Dalam Islam ada prinsip, boros adalah teman setan. Pada prinsipnya seorang muslim harus efisien. Dalam kaitannya dengan membelanjakan rejeki, seorang muslim harus menganut prinsip seimbang, yaitu antara

pelit dan boros.

- h. Pada prinsipnya kinerja manusia muslim tidak dinilai dari yang diperoleh, namun dari apa yang dipersembahkan atau diberikan pada kehidupan (prinsip memberi). Karena itu keterbatasan konsentrasi, kepekaan, pengetahuan, penalaran, dan ketidaklengkapan sistem-sistem pilihan, tidak boleh menghalangi pengarahannya perilaku individu dan organisasi pada pemberian yang terbaik yang dapat disumbangkan.

(3). Asumsi-Asumsi Berkaitan dengan Perilaku Manajemen

- a. Peran utama manajer adalah perwujudan dari peran utama sebagai manusia, yang tugas utamanya adalah menjadikan organisasi sarana untuk mencapai tujuan hakiki dan mengajak partisipasi organisasi memberikan kontribusinya yang terbaik
- b. Untuk menjalankan tugas utama tersebut manajer harus memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban partisipan yang didasarkan pada pencapaian tujuan hakiki.
- c. Manajer mengajak partisipan lainnya untuk bersifat adil, yaitu menyumbangkan tenaganya sesuai dengan kewajibannya, bahkan bersifat ihsan yaitu memberikan lebih banyak dari kewajibannya.
- d. Peranan manajemen pada hakekatnya merupakan proses pengambilan keputusan yang tunduk pada nilai-nilai keilahian, yang tidak terduga untuk kepentingan sesaat (laba).
- e. Esensi pengendalian manajemen adalah menyatu di diri individu sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban yang tidak hanya kepada manusia, namun yang lebih penting kepada Tuhan YME. Arah pengendalian manajemen adalah pada pencapaian tujuan hakiki.

3. Efisiensi

Secara sederhana efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan. Menurut Arif Suadi dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen menyatakan efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan, hubungan

antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar. (Arif Suadi, 2013). Di dalam buku Ekonomi Manajerial karangan Aulia Tasman dan M. Hafidz Aima, Yotopoulos dan Nugent menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan pencapaian output maksimum dari seperangkat sumber daya, yang terdiri dari atas dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi harga dan teknis. Efisiensi harga berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial tentang alokasi dari berbagai variasi faktor produksi, yaitu input produksi yang dapat dikontrol perusahaan. Efisiensi teknis berhubungan dengan sumber daya tetap dalam perusahaan, paling kurang dalam jangka pendek, keberadaannya secara eksogen dan bagian dari lingkungan yang tersedia. Bila efisiensi harga dan efisiensi teknis secara bersama terjadi, maka terdapat kondisi yang cukup bagi efisiensi ekonomis. (Aulia Tasman, 2013)

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi tidak dijelaskan secara lebih detail untuk keperluan ekonomi atau bisnis. Ditinjau dari topik skala produksi arti efisiensi masih kabur dan sulit untuk dipahami. Arti yang nyaris mengena adalah pada arti kata umum dari KBBI yaitu ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). (Kebudayaan, 2016). Dari segi ekonomi, *efisiensi* selalu dikaitkan dengan proses produksi. Secara umum proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilalui barang atau produk sebelum dipasarkan. Proses produksi meliputi proses input (bahan, resource, pekerja dan modal) yang kemudian akan dibentuk menjadi output (barang jadi atau produk) setelah melalui proses-proses tertentu. Definisi efisiensi di dalam proses produksi adalah hal yang ingin dicapai untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Fokus pada penggunaan input secara minimalis namun tetap menghasilkan target output yang diinginkan. Tujuan dari meminimalkan input adalah untuk menekan atau memangkas besaran biaya yang akan dikeluarkandalam proses-proses produksi. Untuk menghasilkan produk atau barang tentu diperlukan unsur-unsur pendukung, seperti modal, pekerja yang memproses, bahan baku (material), mesin. Semua hal tersebut akan ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan maksimal.

a. Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah entitas bisnis. Konsep efisiensi seringkali didefinisikan sebagai melakukan sesuatu secara benar (*doing the thing right*). Hal ini biasanya selalu dikaitkan dengan bagaimana cara perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, konsep efisiensi seringkali dilihat dari sisi biaya. Perusahaan selalu berusaha agar tingkat biaya ditekan sampai pada level seminimal mungkin untuk menghasilkan tingkat *output* yang diinginkan dalam proses transformasi dari *input* menjadi *output*.

Dalam sudut pandang perusahaan dikenal tiga macam efisiensi, yaitu:

- 1). *Technical Efficiency* yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mencapai level *output* yang optimal dengan menggunakan tingkat *input* tertentu.
- 2). *Allocative Efficiency*, merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan *inputnya* dengan struktur harga dan teknologinya.
- 3). *Economic Efficiency*, yaitu kombinasi antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif.

Iskandar (2012) menyatakan ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi yaitu

- 1). Apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
- 2). Input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama, dan
- 3). Dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi. (Iskandar, 2012)

b. Pengukuran Efisiensi

Menurut Silkman dalam Rina Rahma Yunita, pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

- 1). Pendekatan rasio

Pendekatan rasio dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan cara menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan. Pendekatan rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduksi

jumlah output yang maksimal dengan jumlah input yang seminimal mungkin.

Pendekatan rasio dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input}$$

Kelemahan dari pendekatan ini adalah bila terdapat banyak input dan banyak output yang akan dihitung, karena apabila dilakukan perhitungan secara serempak maka akan menimbulkan banyak hasil perhitungan sehingga menghasilkan asumsi yang tidak tegas.

2). Pendekatan Regresi

Pendekatan regresi yaitu pendekatan yang menggunakan sebuah model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat input tertentu. Fungsinya dapat dilihat di bawah ini:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n)$$

Dimana : Y = Output,

X = Input

Pendekatan regresi akan menghasilkan hubungan yang dapat digunakan untuk memproduksi tingkat output yang dihasilkan sebuah Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) pada tingkat output tertentu. UKE tersebut akan bernilai efisien, apabila mampu menghasilkan jumlah output lebih banyak dibanding jumlah output hasil estimasi. Pendekatan ini juga tidak dapat mengatasi kondisi banyak output, karena hanya satu indikator output yang dapat ditampung dalam sebuah persamaan regresi. apabila dilakukan penggabungan banyak output dalam satu indikator, informasi yang dihasilkan menjadi tidak rinci lagi.

3). Pendekatan *Frontier*

Pendekatan ini mempunyai dua jenis yaitu: *parametrik dan non-parametrik*. Pendekatan parametrik terdiri dari *Stochastic Frontier Approach (SFA)* yaitu perluasan dari model asli deterministic untuk mengukur efek-efek yang tidak terduga (*stochastic Frontier*) di dalam batas produksi, *Distribution Free Approach (DFA)* merupakan efisiensi biaya mengukur

seberapa dekat biaya dari suatu bank dengan biaya terendah yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang sama pada kondisi yang sama, dan *Thick Frontier Approach (TFA)*, sedangkan non-parametrik meliputi *Data Envelopment Analysis (DEA)* yaitu model pemrograman linier fraksional yang dapat mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk setiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai hubungan fungsional antara input dan output (tidak seperti *regresi*). Pendekatan *frontier* lebih superior karena penggunaan teknik program atau statistic yang menghilangkan pengaruh dari perbedaan harga output (tidak seperti regresi).input dan faktor eksogen lainnya dalam mempengaruhi kinerja yang akan diobservasi. Pendekatan ini telah digunakan secara lebih luas dalam analisis regulasi, yaitu untuk mengukur pengaruh dari merger dan akuisisi,regulasi modal, deregulasi suku bunga deposito, pergeseran restriksi geografis pada cabang dan holding dari perusahaan akuisisi. Keuntungan yang paling utama dari pendekatan ini adalah dapat mengukur secara objektif kuantitatif dengan menghilangkan pengaruh dari harga pasar dan faktor eksogen lainnya yang mempengaruhi kinerja yang akan diobservasi (Nasution, 2021)

c. Penganggaran

Sebuah entitas akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila dikelola dengan cara yang tepat. Jajaran manajemen , mulai dari dewan komisaris, para direktur,dan para manajer bertanggungjawab untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen yang pertama sekali dilakukan adalah perencanaan (*planning*). Salah satu langkah efektif untuk menjaga bisnis dan alat – alat pembayaran agar tetap terarah salah satu langkah yang efektif adalah dengan melakukan proses penganggaran. Pemikiran strategis disetiap lembaga keuangan adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Penyusunan strategi sangat perlu dilakukan untuk menghadapi lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal yang selalu bergejolak. Kegiatan penyusunan anggaran juga

diberlakukan dalam perbankan syariah yang merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memiliki tugas yang berkaitan erat dengan masyarakat. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah¹, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. (Muh. Salahuddin, 2017)

Penganggaran menurut para pakar praktisi dan akademisi adalah rencana yang sistematis secara periodic dengan angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan baik perusahaan manufaktur, dagang dan jasa seperti bank syariah. Penganggaran juga diartikan sebagai sistem atau unit moneter, maka sering kali penganggaran disebut dengan rencana keuangan. Rencana keuangan ini menempati posisi yang sangat penting dalam manajemen suatu perusahaan karena segala kegiatan akan dikualifikasikan dengan satuan uang yang menjadi ukuran pencapaian efisiensi dan efektifitas yang dilakukan atau operasional perusahaan tersebut. (Nurul Susianti & Nur Awwalunnisa, 2020). Penganggaran bank syariah sewajarnya harus sesuai dengan prinsip operasional bank syariah secara umum yang telah diatur oleh otoritas jasa keuangan dan fatwa MUI, sehingga syarat dan ketentuan dalam kegiatan usaha bank syariah tetap dalam koridor syariat Islam. Dasar hukum bagi operasional perbankan syariah tersebut adalah sistem penganggaran berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan sederet aturan tentang operasional bank syariah tersebut, ketentuan yang di berlakukan untuk dasar penyusunan dan penggunaan anggaran, diantaranya adalah:

- 1). Tidak boleh ada penambahan pendapatan atau keuntungan secara tidak sah atau riba
- 2). Transaksi untung-untungan atau *maysir*
- 3). Transaksi yang tidak jelas (*gharar*)
- 4). Objek yang digunakan dalam transaksi dilarang dalam syariah atau haram

5). Ketidakadilan pihak lain (zalim) (Muh. Salahuddin, 2017)

Dalam praktek, anggaran perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan perusahaan yang menyediakan barang dagagangan lainnya itu berbeda dengan anggaran pada lembaga keuangan syariah, karena pada anggaran perusahaan dagang maupun manufaktur yang dianggarkan adalah barang-barang atau persediaan seperti bahan baku, bahan penolong sampai kepada proses pembuatan produk. Jenis – jenis anggaran pada perusahaan manufaktur anantara lain seperti anggaran penjualan, anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik dan anggaran – anggaran lain yang menunjang kegiatan operasionalnya. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, yang dianggarkan adalah jasa yang sebenarnya pilihan anggarannya lebih luas dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya. Jenis anggaran pada lembaga keuangan perbankan syariah antara lain adalah :

- 1). Anggaran produksi yang berkaitan dengan pengembangan produk baik produk bagi hasil, jual beli , sewa – menyewa atau jasa lainnya
- 2). Anggaran Kas
- 3). Anggaran Tenaga Kerja yang dalam bank syariah disebut karyawan bank
- 4). Anggaran Penjualan yang diukur dengan jumlah nasabah dan penggunaan produk – produk baik bagi hasil, jual beli , sewa – menyewa atau jasa lainnya
- 5). Anggaran operasional bank Syariah
- 6). Anggaran Biaya operasi

Untuk menyusun anggaran , dibutuhkan data – data yang berasal dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut (Muhammad, 2011) :

- 1). Laporan keuangan periode lalu.

Dalam penyusunan anggaran yang meng gunakan metode seperti ini memang sangat mudah karena membandingkan anggaran lama dengan anggaran yang baru akan disusun. Karena akan memperkirakan pengeluaran dan pemasukan yang akan diperoleh walaupun belum terealisasi secara pasti. Laporan keuangan periode lalu juga

digunakan sebagai tolak ukur bank syariah dalam merencanakan pengeluaran *finansial* dan pemasukan *funding* dari masyarakat, jadi bank syariah sudah memiliki bayangan ke depan tentang rencana keuangan yang akan direalisasikan di masa mendatang. Data seperti ini sangat membantu kelancaran operasional di dalam bank syariah

2). Data riset pasar mengenai potensi *funding* dan *financing*.

Data riset pasar sangat dibutuhkan oleh bank syariah mengingat kondisi pasar yang terus berubah sehingga bank harus melihat prospek ke depan. Karena ketika pasar naik dan pendapatan di masyarakat meningkat maka *funding* dan *financing* pada bank syariah akan berjalan dengan baik karena semua dipengaruhi oleh pasar. Dalam hal bank syariah harus mampu melihat potensi masyarakat, untuk menentukan suatu anggaran dalam penetapannya bank akan menetapkan anggaran mengenai dana yang akan *outstanding* dengan melihat bagaimana kondisi masyarakat, Ketika pendapatan masyarakat baik maka anggaran yang harus ditetapkan adalah tentang *funding* namun jika kondisi masyarakat sedang tidak baik maka anggaran yang ditetapkan lebih kepada *financing*.

3). Permohonan pembiayaan yang akan direalisasikan untuk periode mendatang

Fungsi Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah adalah sebagai Lembaga intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit, pihak surplus merupakan masyarakat yang menyimpan dananya (menabung) ke bank syariah dan pihak defisit merupakan pihak yang melakukan pembiayaan pada bank syariah. Bank syariah harus mengatur secara efektif antara *funding* dan *financing* agar keduanya berjalannya baik. Dalam bank syariah tentunya terdapat banyak permohonan pembiayaan dari masyarakat (*financing*) yang diminta untuk direalisasikan segera, jadi bank syariah harus bisa menentukan pembiayaan mana yang diutamakan untuk direalisasikan terlebih dahulu. Biasanya banksyariah akan mendahulukan permohonan pembiayaan yang lebih menguntungkan dan memiliki risiko kecil, ini dilakukan agar bank tidak

mengalami terlalu banyak kesulitan dalam menarik dana yang telah dikeluarkan tersebut, ini juga ditujukan agar bank dalam mengeluarkan dananya ke nasabah untuk pembiayaan tidak mengalami kredit macet.

4). Rencana Angsuran Pembiayaan.

Perencanaan angsuran pembiayaan ini harus dilakukan untuk mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran dan nominal yang akan dibayarkan. Rencana anggaran pembiayaan ini juga dilakukan agar bank tidak mengalami kesulitan dalam mengontrol nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil dan juga untuk menghindari terjadinya diskriminasi sebelah pihak karena kurangnya kepercayaan dan akad awal atau kesepakatan awal yang sudah dibuat kedua belah pihak, jadi rencana angsuran pembayaran ini sangatlah penting bagi sebuah lembaga keuangan.

5). Rencana pengeluaran biaya periode berikutnya.

Perencanaan pengeluaran pada periode berikutnya harus diperlukan karena prospek ke depan bank syariah ditentukan dari pencapaian target di masa yang akan datang yang artinya seberapa jauh bank syariah mampu merealisasikan target yang direncanakan sebelumnya. Rencana pengeluaran biaya periode berikutnya ini juga sangat diperlukan agar bank juga bisa menyisihkan dananya agar bisa digunakan untuk pembiayaan periode berikutnya agar mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet karena jika kas hanya dihabiskan untuk periode tertentu dan terjadi kredit macet maka bank akan mengalami kendala dalam kegiatan operasional funding dan financing. Jika hal ini terjadi, maka Kesehatan bank akan dipertanyakan dan jika ini terus berlanjut terjadi maka bank tersebut akan dikatakan tidak sehat

6). Kebijakan bank syariah yang telah disepakati bersama.

Dalam merencanakan penganggaran pada bank syariah, harus diterapkan dan disepakati bersama-sama agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kebijakan bank syariah memang harus disepakati bersama, karena kebijakan yang diambil akan mempengaruhi setiap

bagian manajemen bank syariah itu sendiri.

7. Asumsi-asumsi penetapan *cash in* dan *cash out* dengan kebijakan banksyariah

Alat bantu yang sederhana yang digunakan untuk melakukan budgeting adalah aliran kas (*cash flow*), yaitu format keuangan yang mengilustrasikan target-target mengenai mengalirnya dana masuk (*cash in*) dan dana keluar (*cash out*) serta saldo kas pada periode tertentu. (Muh. Salahuddin, 2017). Pada prakteknya selama bank syariah beroperasi terdapat dua macam aliran kas, yaitu kas masuk (*cash in flow*) dan kas keluar (*cash out flow*). Aliran kas masuk merupakan uang kas yang masuk pada bank syariah (penerimaan uang) contohnya perolehan pendapatan yang didapatkan dari dana yang *outstanding* seperti pendapatan bank dari investasi mudharabah, musyarakah, lalu fee dari ijarah dan pelayanan bank-bank lain, margin yang didapatkan dari murabahah, pendapatan - pendapatan bank ini termasuk dalam *cash in flow* lalu hasil investasi atau pendapatan diluar usaha serta dapat pula diperoleh dari pinjaman pihak lain, misalnya giro pada bank lain. Aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan untuk financial seperti gaji karyawan. Uang keluar juga dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak.

Aliran kas masuk dan aliran kas keluar ini akan terus menerus terjadisepanjang bank syariah tersebut beroperasi. Oleh karena itu pihak manajemen perlu mengatur baik aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Hal yang perlu diperhatikan contohnya memastikan agar jumlah yang masuk selalu lebih besar daripada jumlah uang yang keluar. Dengan demikian keseimbangan cash flow bank syariah dapat terjamin. Apabila jumlah kas terlalukecil maka akan berbahaya, karena akan menghambat aktivitas bank syariah. Oleh karenanya bank syariah menerapkan likuiditas untuk memenuhi kebutuhanjangka pendek bank, untuk mengantisipasi deficit anggaran (*budget deficit*).

Dalam Lembaga keuangan, jika terdapat arus kas tentunya akan dilaporkan dalam bentuk laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas

masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode.(Hery, 2009) Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan kas juga digunakan oleh para kreditor dan investor dalam menilai likuiditas maupun potensi perusahaan khususnya bank syariah dalam menghasilkan keuntungan. Cash flow dapat disusun dengan periode (*interval*) per tahun, per bulan, atau pun per hari. Semakin pendek jangka waktu yang dipakai, hasil penyusunan akan memiliki ketepatan yang lebih tinggi. Untuk bank, umumnya menggunakan interval bulanan dan tahunan.(Muhammad, 2011)

1). Peramalan Penjualan

Peramalan (*forecasting*) merupakan perkiraan kejadian di masa mendatang dengan menggunakan berbagai asumsi, baik yang sudah terjadi ataupun berbagai kemungkinan lainnya yang diharapkan terjadi di masa mendatang. Taksiran atau ramalan penjualan adalah kegiatan memperkirakan atau membuat taksiran produk yang akan dijual di masa mendatang dan dibuat berdasarkan data historis. Peramalan penjualan perlu dilakukan perusahaan karena dengan melakukan peramalan penjualan, perusahaan dapat memperkirakan penjualannya di masa mendatang.(Nafarin, 2013). Dari beberapa referensi yang merumuskan tentang peramalan penjualan dapat diambil suatu benang merah bahwa peramalan penjualan adalah :

- a. Peramalan penjualan merupakan perkiraan secara teknis permintaan yang didasarkan pada permintaan konsumen. Dalam perusahaan jasa seperti lembaga keuangan bank dan non bank yang dimaksud adalah perkiraan berdasarkan permintaan dari nasabah seperti untuk pembiayaan multiguna, murabahah, mudharabah atau pembiayaan modal kerja lainnya sehingga anggaran penjualan dapat disalurkan
- b. Peramalan terhadap penjualan juga memperkirakan resiko yang

terjadi nantinya

- c. Peramalan terhadap penjualan juga termasuk dari anggaran yang berisi tentang taksiran- taksiran tentang keadaan perusahaan termasuk kas yang akan digunakan dan tidak.

Banyak alat dan cara yang digunakan untuk meramalkan penjualan, menurut sifatnya, cara atau metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan tersebut dapat dibedakan menjadi dua dikemukakan oleh (M Munandar, 2007) yaitu :

- a. Bersifat Kualitatif.

Merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat objektif. Dengan demikian ketepatan hasil taksiran menjadi diragukan. Adapun beberapa cara penaksiran atau peramalan yang bersifat kualitatif ini adalah :

- (1). Pendapat pimpinan bagian pemasaran.
- (2). Pendapat para petugas penjualan.
- (3). Pendapat lembaga-lembaga masyarakat.
- (4). Pendapat konsumen.
- (5). Pendapat para ahli yang dianggap memahami.

- b. Bersifat Kuantitatif

Merupakan cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan-perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik. Dengan menggunakan cara peramalan atau penaksiran yang kuantitatif semacam ini diharapkan dapat menghilangkan unsur-unsur subjektif seseorang, sehingga hasil taksirannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Namun cara ini mengandung kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti halnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat

pendidikan dan cara berfikir masyarakat, struktur individu yang berbeda dan lain sebagainya

Berikut ini beberapa cara penaksiran yang bersifat kuantitatif adalah sebagai berikut :

(1). Cara penaksiran berdasarkan dari pada data historis dari suatu variabel saja, yaitu variabel yang ditaksir itu sendiri misalnya :

(a) Metode Trend Bebas (*Free Hand Method*) Pada dasarnya semua metode trend menggunakan prinsip yang sama yaitu berusaha mengganti atau merubah garis patah-patah dalam grafik yang dibentuk oleh data historis menjadi garis yang lebih teratur bentuknya. Metode trend bebas menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis diganti atau dirubah menjadi garis lurus dengan cara bebas berdasarkan pada perusahaan dari orang yang bersangkutan.

(b). Metode Trend Setengah Rata-Rata (*Semi Average Method*) Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data historis tersebut. Data historis tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan-perhitungan statistik dan matematika tertentu, sehingga pengaruh unsure subjektif dapat dihilangkan.

(c). Metode Trend Moment (*Moment Method*) Metode trend ini menggunakan cara-cara perhitungan statistik dan matematika tertentu. Untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian pengaruh unsur subjektif dapat dihindarkan.

(d). Metode Kuadratik (*Parabolic Method*) Metode

kuadratik adalah metode yang digunakan untuk membentuk garis lengkung (non linier). Dalam hal ini digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung.

(e). Metode Trend Last Square (*Last Square Method*)
Metode trend last square hanya merupakan penyederhanaan dari metode trend moment, sehingga mempermudah perhitungan-perhitungannya.

(2). Cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Cara penaksiran semacam ini misalnya :

(a). Metode Regresi Tunggal yaitu penaksiran hanya menggunakan satu variabel terikat dan satu variabel bebas.

(b). Regresi Ganda (*Multiple Regression*) yaitu penaksiran menggunakan satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas.

(3). Cara penaksiran yang menggunakan metode dan statistik (*trend* ataupun regresi) yang ditetapkan pada berbagai analisis khusus, seperti misalnya:

(a). Analisis Industri atau Analisis *Market Share*.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap keadaan industri secara keseluruhan. Dengan analisis tersebut dan dapat diketahui peranan perusahaan terhadap industri. Dalam kaitannya dengan budget penjualan dapat diketahui perbandingan antara penjualan perusahaan dengan penjualan seluruh industri yang berada

disekitarnya.

- (b). Analisis Jenis-Jenis Produk Yang Dihasilkan Perusahaan (*Product Line*) Analisis jenis-jenis produk diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis barang produksi. - Analisis Pemakaian akhir Dari Produk (*End Use Analisis*) Perkembangan penjualan dari perusahaan barang industri, banyak dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan yang memprosesnya lebih lanjut. Dengan metode ini diperiksa secara lebih terperinci tentang penggunaan akhir dari produk tersebut.
- (c). Analisis Pemakaian akhir Dari Produk (*End Use Analisis*) Perkembangan penjualan dari perusahaan barang industri, banyak dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan yang memprosesnya lebih lanjut. Dengan metode ini diperiksa secara lebih terperinci tentang penggunaan akhir dari produk tersebut.

Dari sekian banyak metode peramalan penjualan yang dapat digunakan dalam perusahaan, yang paling sering digunakan adalah metode trend atau lebih lazim disebut dengan metode kuadrat terkecil. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ini, perusahaan akan dapat melakukan perhitungan peramalan penjualan produk perusahaan melalui dua macam bentuk yaitu bentuk linier/garis lurus dan bentuk kuadrat/garis lurus dan bentuk kuadrat/garis lengkung. Bentuk mana yang akan digunakan oleh perusahaan tergantung dari bentuk mana yang paling sesuai dengan kondisi yang berlaku di perusahaan saat ini. Adapun bentuk umum dari trend garis lurus dan garis lengkung yang sering dipergunakan untuk penyusunan peramalan penjualan produk perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

$Y = a + bx$ untuk trend garis lurus, serta

$Y = a + bx + cx^2$ untuk trend garis lengkung

Dimana :

Y = variabel yang akan diramalkan, dalam hal ini adalah peramalan penjualan produk perusahaan.

a = konstanta yang akan menunjukkan besarnya harga Y apabila X sama dengan 0 (nol)

b = variabel per x " yaitu menunjukkan besarnya perubahan nilai Y dan setiap perubahan satu unit x .

x = unit waktu, yang dapat dinyatakan dengan minggu, bulan, semester, tahun dan lainnya tergantung kepada kesesuaian dari perusahaan itu sendiri.

Intinya adalah hasil dari peramalan penjualan adalah perkiraan atau taksiran yang sudah diklasifikasi dan kuantifikasikan terhadap kondisi yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau nasabah jika di bidang lembaga keuangan bank atau non bank. Hasil dari peramalan adalah rencana penjualan dengan memperhitungkan :

- a. Pendapatan jika anggaran direalisasikan
- b. Strategi – strategi dalam mendistribusikan anggaran
- c. Ketetapan operasional yang digunakan oleh perusahaan misalnya bidang perbankan syariah harus tetap mengikuti prinsip – prinsip syariah. (Nurul Susianti & Nur Awwalunnisa, 2020)

Rencana penjualan yang menggunakan peramalan sebagai pertimbangan keputusan manajemen dalam menentukan investasi yang tepat, volume penjualan produk, tingkat margin yang tepat dan pembiayaan lainnya bisa saja diterima oleh manajer dan divisi – divisi yang bersangkutan tetapi bisa juga dimodifikasi bahkan ditolak. Jenis – jenis produk yang dapat dijual oleh lembaga keuangan bank dan non bank antar lain adalah :

- a. Produk khusus bagi hasil yaitu produk mudharabah dan musyarakah

- b. Produk jual beli yaitu murabahah, salam dan ishtisna
- c. Produk sewa - menyewa yaitu Ijarah, Ijarah Muttahi' Bittamlik (IMBT)
- d. Produk jasa lainnya seperti produk titipan seperti tabungan amanah, tabungan yaddarmanah, jasa kliring, transfer, dll

Dalam menyusun anggaran penjualan, perlu diperhatikan beberapa point agar rencana penjualan dapat mendatangkan income yang telah ditargetkan. Menurut Bachruddin dalam (Nurul Susianti & Nur Awwalunnisa, 2020) point – point tersebut antara lain adalah :

- a. Jumlah peminat dari setiap produk yang ditawarkan
- b. Jumlah peluang baru dalam setiap pengembangan produk
- c. Jumlah peluang nasabah yang memenuhi syarat
- d. Ukuran pembiayaan yang diajukan nasabah
- e. Ukuran pengajuan pembiayaan secara keseluruhan dalam semua produk, misal kredit atau pembiayaan besar, usaha menengah dan usaha kecil
- f. Penentuan pendapatan dana (margin) dalam setiap jenis pembiayaan
- g. Perhitungan pendapatan rata – rata dari seluruh pembiayaan yang diharapkan.

Selain dari point – point di atas , lembaga keuangan syariah bank dan no bank juga harus memperhatikan pengaruh dari lingkungan eksternal sebagai berikut :

- a. Kondisi umum yang mungkin mempengaruhi perusahaan selama periode mendatang
- b. Populasi dalam area pemasaran
- c. Inflasi
- d. Deflasi
- e. Perusahaan dalam situasi persaingan yang diharapkan

Dari lingkungan internal, perlu dipertimbangkan perubahan global

yang disebabkan oleh teknologi seperti :

- Perubahan kebijakan promosi
 - Perubahan lokasi atau wilayah pemasaran
 - Perubahan kebijakan personel
 - Perubahan kebijakan harga

2). Penyusunan Anggaran Penjualan

Berdasarkan beberapa konsep penyusunan anggaran penjualan, contoh khusus pembiayaan sebagai berikut :

a. Alokasi Dana Pembiayaan

Pola alokasi dana pembiayaan meliputi penentuan jenis – jensi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank serta penentuan proporsi alokasi dananya dalam satuan portofolio atau pembiayaan bagi bank syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Anggaran Penjualan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

No	Jenis Kredit	Proporsi	Alokasi Dana
1	Usaha Besar	20%	Rp. 400 juta
2	Usaha Menengah	40%	Rp. 800 juta
3	Usaha Kecil	40%	Rp. 800 juta
Total		100%	Rp. 2000 Jt

Sumber : Penganggaran Bank Syariah Nurul Susianti, 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Perhitungan Pendapatan Dana

Berdasarkan alokasi dan pembiayaan tersebut di atas dilakukan perhitungan pendapatan dana sebagai berikut :

Tabel 2.2. Anggaran Perhitungan Pendapatan Dana

No	Jenis Kredit	Proporsi	Pen. Dana	Pend. Dana rata-rata
1	Usaha Besar	20%	15%	$(20\% \times 15\%) = 3,0\%$
2	Usaha Menengah	40%	12%	$(40\% \times 12\%) = 4,8\%$
3	Usaha kecil	40%	12%	$(40\% \times 12\%) = 4,8\%$
Total		100%		12,0%

Sumber : Penganggaran Bank Syariah Nurul Susianti, 2020

Dari contoh di atas anggaran penjualan di bank tentunya berbeda – beda dalam menentukan proporsinya. Seperti contoh yang dibuat di sini, jenis

pembiayaan bagi bank syariah ini dikategorikan untuk pembiayaan usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil dengan proporsi masing – masing 20%, 40% dan 40%. Proporsi yang digunakan setiap bank tergantung kepada tingkat resiko pembiayaannya dengan melihat 5 C yang telah dianalisis kepada setiap masing – masing nasabah yang dituju. 5 C tersebut adalah metode untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar kembali atas penjualan pembiayaan yang terdiri dari :

- a. Character
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Collateral
- e. Condisional

3). Anggaran Operasional (Biaya dan Investasi)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran biaya dan investasi dibentuk, yaitu sebagai berikut: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014)

- a. Unit Kerja Pengelolaan Anggaran Biaya dan Investasi Penunjukan unit kerja pengelolaan biaya dan investasi didasarkan atas fungsi unit kerja yang bersangkutan dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1). Memberi data historis penggunaan biaya dan investasi seluruh unit kerja
 - 2). Menentukan unit atau standard cost dari masing-masing biaya dan investasi yang dikelolanya
 - 3). Melakukan monitoring dan bertanggung jawab atas realisasi biaya yang dikelolanya.

b. Pengelompokan Anggaran Biaya dan Investasi

Anggaran biaya dan investasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1). Anggaran biaya dan investasi rutin yang merupakan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin

dan/atau memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- (a) Memberi manfaat terhadap peningkatan aktivitas operasional unit kerja;
- (b). Resiko implementasi rendah;
- (c). Pelaksanaan rencana kerja tidak membutuhkan koordinasi dan keterlibatan beberapa/banyak unit kerja;
- (d). Aktivitas pelaksanaan bersifat berulang.

2). Anggaran biaya dan investasi nonrutin (inisiatif) Merupakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tidak rutin dan/atau memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- (b). Implikasi pelaksanaan rencana kerja memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan proses kerja dan peningkatan pendapatan bank;
- (c). Pelaksanaan rencana kerja membutuhkan koordinasi dan ketelibatan beberapa atau banyak unit kerja;
- (d). Merupakan pengembangan jaringan cabang dan electronic channel
- (e). Merupakan pengembangan sistem teknologi dan informasi yang termasuk dalam kategori proyek IT;
- (f). Merupakan pengembangan strategis yang terkait dengan bidang human capital dan bidang learning & development

Anggaran biaya disusun sebagai berikut :

- 1). Anggaran Biaya Operasional Bank yang disusun adalah sebagai berikut :
 - a). Anggaran biaya langsung (direct expense) dilakukan oleh masing-masing unit kerja
 - b). Anggaran biaya tertentu yang disentralisir, penyusunan anggaran dilakukan oleh unit kerja yang berwenang (unit kerja pengelola

biaya)

- 2). Anggaran Beban Tenaga Kerja (BTK) dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu beban gaji, beban lainnya (non gaji) dan biaya pendidikan dan pelatihan.

Untuk menyusun anggaran biaya operasional diperlukan penaksiran yang akurat. Untuk bisa melakukan penaksiran secara akurat, diperlukan berbagai data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1). Faktor-faktor intern yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat didalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :

- a. Laba Rugi tahun-tahun yang lalu.
- b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah operasional dan marketing, syarat pembayaran jasa, pemilihan saluran pemasaran dan sebagainya.
- c. Kapasitas pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan.
- d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya kuantitative maupun keterampilan dan keahliannya kualitative.
- e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan.
- f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan.
- g. Kebijakan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik dibidang pemasaran, di bidang administrasi maupun di bidang personalia.

- 2). Faktor-faktor ekstern yaitu informasi dan pengalaman yang terdaftar di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :

- a. Keadaan persaingan.

- b. Tingkat pertumbuhan penduduk.
- c. Tingkat penghasilan masyarakat.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat.
- e. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.
- f. Keadaan perekonomian.
- g. Kemajuan teknologi dan sebagainya.

4. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. (Kebudayaan, 2016) Menurut Beni, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. (Beni Pekei, 2016) . Mardiasmo mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2016b). Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Mahmudi, 2015). Efektivitas diartikan secara luas, yaitu sebagai keadaan dimana kita bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu (Mahmudi, 2015).

Efektivitas diartikan secara luas, yaitu sebagai keadaan dimana kita bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Efektivitas lembaga keuangan mikro syariah dapat diukur dengan jumlah anggota yang bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan, atau distribusi peningkatan penghasilan para anggotanya. Hidayat menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas, lokasi bank

dan jaminan / agunan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*. (Ulber Silalahi, 2017)

a. Kriteria Efektivitas Organisasi

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi:

- 1). Kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan.
- 2). Kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan.
- 3). Kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup.

Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan berlabar, dan kesejahteraan pegawai (Eddy Purnomo, 2015). Pendapat lain mengatakan bahwa beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

- 1). Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
- 2). Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
- 3). Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
- 4). Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
- 5). Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
- 6). Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
- 7). Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
- 8). Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
- 9). Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian

tujuan,yang melibatkan usaha tambahan,kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki

- 10).Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
- 11).Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sam lain,artinya bekerja sama dengan baik,berkomunikasi dan mengkoordinasikan
- 12).Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Steers, 1980)

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ukuran Efektivitas

Dalam pengukuran efektivitas, keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2015). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau

kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisel*

Efektivitas dapat digambarkan dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOM}}{\text{OUTPUT}}$$

Dari rumus tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done*”. Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan. (Moenir AS, 2016) Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif

5. Balance Scorecard

Di Indonesia *balance scorecard* belum dikenal serta dipahami secara luas dan menyeluruh, maka masih sedikit organisasi atau perusahaan yang menerapkannya. Keunggulan dan kegunaan *balance scorecard* berdasarkan

pengalaman perusahaan yang bertaraf kelas dunia yang telah mengimplementasikan *balance scorecard* dijelaskan bahwa terjadi banyak perbaikan kinerja perusahaan dari tahun ke tahunnya yang disebabkan karena seluruh pegawai yang ada di dalam perusahaan telah mengerti secara jelas bahwa aktivitas yang dilakukan oleh mereka setiap harinya mempunyai akibat pada keberhasilan dari pencapaian visi, misi, serta strategi perusahaan. Bank-bank di Indonesia yang telah menerapkan syariah Islam memiliki keunikan tersendiri pada struktur organisasinya yaitu dengan memberlakukan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan badan yang mengawasi penerapan syariah Islam secara benar. Bank syariah sering disebut juga sebagai bank tanpa bunga, meskipun demikian keberadaan bank syariah mampu menarik minat masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk melakukan transaksi di bank syariah, meskipun belum sebesar dan setenar bank konvensional. Metode *balance scorecard* merupakan sistem pengukuran kinerja yang dapat secara terus menerus memantau keberhasilan penerapan strategi dari perusahaan dan secara komprehensif dapat mengukur kinerja perusahaan dan secara jelas pula dapat diketahui keseimbangan dari kinerja perusahaan untuk memperkuat keberadaan perbankan syariah.

Menurut (Yuwono et al, 2003), model perancangan *balance scorecard* untuk perbankan syariah, meliputi tahap-tahap:

- 1). Evaluasi dan konsensus visi, misi dan strategi bank syariah
- 2). Penentuan strategi bank syariah
- 3). Pemilihan perspektif dan penentuan sasaran strategi bank syariah
- 4). Tolok ukur *balance scorecard* bank syariah
- 5). Analisis hubungan sebab akibat dan peta strategi bank syariah.

Menurut Kaplan dan Norton dalam (Yuwono et al, 2003), konsep *balanced scorecard* yang diterapkan mempunyai 4 perspektif yaitu:

- 1). Perspektif keuangan
- 2). Perspektif pelanggan
- 3). Perspektif proses bisnis internal

4). Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran

Perspektif Kaplan dan Norton ini dianggap mencukupi, namun terdapat sedikit perubahan nama, dimana untuk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank ,perspektif pelanggan menjadi perspektif nasabah

Penentuan sasaran strategi yang dapat dilakukan, misalnya:

- 1). Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan selektif prudent
- 2). Meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah
- 3). Meningkatkan jumlah kantor layanan baru
- 4). Mengembangkan produk andalan
- 5). Mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama pihak ketiga
- 6). Meningkatkan profesionalisme pegawai, dan
- 7). Meningkatkan pengawasan dan budaya patuh pada aturan.

Dalam memilih tolok ukur kinerja (*performance measures*) yang akan dijalankan tentu saja harus diperhatikan keterkaitan antara visi, misi, serta strategi bank syariah dan diukurinya keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah dipahami, serta dipahaminya tolok ukur tersebut oleh seluruh bagian perusahaan paling tidak oleh bagian atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap setiap ukuran yang dipilih. Berbagai tolok ukur yang pilih dalam perancangan *balance scorecard*, diantaranya: (Yuwono et al, 2003)

1). Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*)

Perspektif keuangan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan pendapatan, terutama dengan upaya menggali potensi nasabah peminjam dana untuk usaha

kecil dan menengah (UKM). Tolok ukur keuangan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis bank syariah dalam pendapatan, yaitu ROA, Net Margin (laba setelah pajak), dan *revenue mix* (bauran pendapatan). Tolok ukur kinerja keuangan yang tidak berorientasi pada pertumbuhan dan pendapatan sebaiknya digunakan sebagai ukuran penunjang guna melengkapi informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan.

2). Perspektif Nasabah (*Customer Perspective*).

Tolak ukur nasabah digunakan ialah untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan jumlah kantor layanan baru, dan dapat meningkatkan pendapatan pada perspektif keuangan. Tolak ukur yang tepat digunakan yaitu tingkat kepuasan nasabah (*customer satisfaction*), penguasaan pangsa pasar (*market share*), kemampuan untuk mempertahankan nasabah lama atau retensi nasabah (*customer retention*), dan kemampuan memperoleh nasabah baru atau akuisinasabah (*customer acquisition*).

3). Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Perspective*).

Perspektif ini memiliki dua sasaran strategis yaitu: (1) mengembangkan produk-produk baru yang dapat diandalkan, dengan tolok ukur yang digunakan adalah pendapatan produk baru dan siklus pengembangan produk dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, tolok ukur yang digunakan yaitu tingkat kesalahan layanan (*service errorrate*), waktu proses (*process time*), dan perjanjian dengan pihak ketiga (*partnerwith third party providers*).

4). Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (*Learning and growth Perspective*).

Terdapat dua sasaran strategis yaitu (1) meningkatkan profesionalisme pegawai. Tolak ukur yang digunakan yaitu: tingkat kepuasan karyawan (*employee satisfaction*), pengembangan pegawai dibandingkan dengan rencana pengembangan keahlian (*staff development versus plan*) dan fleksibilitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan (*functional flexibility of employee*) dan (2) meningkatkan pengawasan dan budaya patuh pada aturan. Tolak ukur yang digunakan yaitu: indeks kepatuhan pegawai (*employee compliance index*).

1). Pendampingan

Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, dan menurut Payne (1986)

bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”..(Edi Suharto, 2020) Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendampingan dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (Badan Perkumpulan Keluarga Berencana (BPKB) Jawa Timur, 2001) Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu atau kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan pendampingan sosial sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Harry Hikmat, 2005) . Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowerment*) (Adi, 2003)

a). Proses dan Pola Pendampingan Usaha Mikro

Menurut Aslihan Burhan beberapa macam pola pendampingan adalah sebagai berikut: (Burhan, 2009)

1). Motivasi

Memotivasi atau memberi dukungan baik dengan moril maupun materi untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya dan memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan professional.

2). Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan berdasarkan tingkat perkembangan kelompok, mulai dari penyadaran diri, motivasi kelompok, administrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif, kepemimpinan sampai analisa situasi

3). Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendidikan yang telah dijalankan dan lebih banyak di arahkan pada program perorangan atau kelompok yang lebih kecil dengan kasus-kasus setempat dan spesifik.

4). Monitoring dan Evaluasi

Mengadakan kunjungan monitoring kepada pengusaha yang melakukan pembiayaan pada setiap kunjungan dicatat perkembangan usaha dan mengevaluasi atau menilai keberhasilan usaha para kreditur atau nasabah.

Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya hubungan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan adalah peran motivator, peran fasilitator dan peran katalisator. (Badan Perkumpulan Keluarga Berencana (BPKB) Jawa Timur, 2001) Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal

jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir ditengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar. Menurut Mayo yang dikutip oleh Adi menuliskan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pendamping, yaitu: (Adi, 2003)

- 1). Menjalin kontak dengan individu, kelompok atau organisasi
- 2). Mengembangkan profil komunitas, menilai (*asses*), kebutuhan dan sumberdaya masyarakat
- 3). Mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang
- 4). Memfasilitasi kemampuan kelompok-kelompok sasaran
- 5). Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antarkelompok atau organisasi
- 6). Mengelola sumber daya yang ada termasuk waktu dan dan
- 7). Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumber daya yang dibutuhkan, misalnya dalam hal dana dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana
- 8). Memonitor perkembangan program atau kegiatan terutama pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien
- 9). Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang dan memfasilitasi proses perpisahan yang efektif
- 10). Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa

b). Prinsip Pendampingan Usaha Mikro

Prinsip-prinsip pendampingan usaha mikro yang bisa diterapkan oleh lembaga-lembaga pendamping usaha mikro adalah sebagai berikut: (Bambang Kustianti, 1991)

1). Prinsip Berkelompok

Kelompok tumbuh dan berkembang dari, oleh, untuk

kepentingan bersama. Selain dengan anggota kelompoknya sendiri, kerjasama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya agar usaha bisa lebih berkembang, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mampu membentuk kelembagaan ekonomi.

2). Prinsip Berkelanjutan

Seluruh kegiatan penumbuhan dan pengembangan program diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang memiliki potensi untuk berlanjut dan berkembang dikemudian hari

3). Prinsip Kewaspadaan

Para pengusaha mikro diberi motivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak terlalu tergantung pada bantuan dari luar.

4). Prinsip Kesatuan Keluarga

Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh, demikian pula komunitas pengusaha mikro bisa menjadi kesatuan keluarga yang utuh. Pengusaha mikro merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha bagi pengusaha-pengusaha lainnya. Sehingga kerjasama dan kolaborasi sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan secara bersama-sama.

5). Prinsip Belajar Menemukan Sendiri

Kelompok tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya

c. Langkah – Langkah Pendampingan Usaha Mikro

Langkah-langkah pendampingan usaha mikro (Fondation, 2009) meliputi:

1). Pengenalan wilayah kerja

Pengenalan wilayah kerja terdiri dari pengenalan terhadap potensi lokal, sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan serta keadaan usaha mikro. Pengenalan wilayah kerja ini sangat diperlukan untuk menetapkan strategi, program dan kegiatan pendampingan usaha mikro yang akan dilaksanakan

2). Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan upaya untuk mengenalkan rencana kegiatan pendamping yang akan dilaksanakan kepada sasaran kegiatan pendampingan (para pengusaha mikro) dan kepada pemangku kepentingan yang lain.

3). Penyadaran

Meningkatkan kesadaran pada pengusaha mikro dalam hal:

- (a). Keberadaan usaha yang sedang ditekuninya
- (b). Masalah-masalah yang dihadapi
- (c). Peluang-peluang perbaikan, pengembangan dan pelestarian usahanya
- (d). Pentingnya menjalin jejaring kemitraan guna perbaikan, pengembangan dan pelestarian usahanya

4). Pengorganisasian

Pengorganisasian diperlukan untuk perbaikan, pengembangan dan pelestarian usahanya, para pengusaha mikro tidak dapat melakukannya secara sendirian tetapi harus saling kerjasama dalam satu wadah kelompok, organisasi asosiasi dan lain-lain.

5). Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mencakup: akan pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan, keterampilan manajerial, Pengelolaan kelembagaan, dan Pengembangan jaringan kemitraan

6). Advokasi

Advokasi yang diperlukan adalah untuk memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan usaha yang benar-benar berpihak kepada pengembangan dan kelestarian usaha. Dukungan tersebut meliputi dukungan kebijakan, dukungan teknis, dukungan kemitraan dari lembaga bisnis, dukungan informasidan publikasiserta dukungan pengoganisasian oleh pihak-pihak berkompeten

7). Politisasi

Politisasi adalah salah satu bentuk upaya terus menerus untuk menaikkan posisi tawar usaha mikro utamanya untuk memperoleh perhatian jajaran birokrasi dan politisi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan menaikkan posisi tawar usaha mikro dengan pemangku kepentingan yang lainnya.

d. Dampak Pendampingan

Dalam mendeteksi dampak pendampingan dapat dibagi dalam tiga tataran (Widyanigrum, 2001), yaitu:

- 1). Dampak di tataran rumah tangga :
 - (a). Peningkatan pendapatan rumah tangga
 - (b). Diversifikasi sumber-sumber pendapatan rumah tangga
 - (c). Peningkatan aset yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti perbaikan
- 2). Dampak di tataran usaha:
 - (a). Peningkatan pendapatan usaha
 - (b).Peningkatan aset tetap, khususnya nasabah dengan pinjaman berulang
 - (c). Peningkatan buruh baik yang diupah maupun yang tidak diupah
 - (d).Pengembangan hubungan-hubungan bisnis pemilik usaha
 - (e). Tingkat kemampuan yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam sistem pajak.

3). Dampak di tataran individu :

- (a). Peningkatan kontrol klien terhadap sumber daya dan pendapatan didalam portofolio ekonomi rumah tangga
- (b). Peningkatan harga diri dan respek dari orang lain
- (c). Peningkatan tabungan individu
- (d). Perubahan sikap dari pasrah menerima masa depan ke arah perilaku yang lebih proaktif dan peningkatan rasa percaya diri
- (e). Perencanaan masa depan yang lebih baik, termasuk rencana jangka panjang untuk usahanya.

6. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren

Di dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 UU no. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa LKM atau lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya LKM dapat dijalankan secara konvensional atau dengan prinsip syariah. Secara definitif memang tidak ada pengertian LKM Syariah dalam UU LKM maupun dalam serangkaian ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, akan tetapi secara tersirat dapat disimpulkan bahwa pengertian LKM Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sematamata mencari keuntungan yang di dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017). Dari pengertian tentang LKM Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa LKM Syariah memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Sebagai lembaga keuangan, LKM Syariah berfungsi sebagai sistem intermediasi atau perantara, dimana dalam konteks ini LKM Syariah berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) dengan orang yang difisit dana (membutuhkan dana), dan sebagai perantara maka LKM Syariah mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan, mengadministrasikan dana dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan/ piutang/ pinjaman, dari proses inilah kemudian LKM Syariah menerima dan membagikan bagi hasil dari dan untuk nasabah atau pihak lain yang menyimpan atau menabung pada LKM Syariah. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017)
- b. Pengembangan usaha menjadi tujuan utama LKM Syariah sehingga pengembangan usaha nasabah menjadi tolak ukur keberhasilan LKM Syariah baik dari segi peningkatan skala ekonomi maupun cakupan usaha. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017)
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memeperkuat unsur – unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama sehingga berdayanya masyarakat yang merupakan nasabah LKM Syariah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah LKM yang dalam implementasinya bisa terkait dengan konsep kemandirian (self help), partisipasi (participation), jaringan kerja (networking), dan pemerataan (equity) (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017).
- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM Syariah dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, dalam konteks LKM Syariah simpanan

adalah sarana yang digunakan LKM Syariah untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017).

- e. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM Syariah kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Dalam konteks LKM Syariah simpanan adalah sarana yang digunakan LKM untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017).
- f. Skala mikro memiliki pengertian bahwa LKM Syariah harus beroperasi pada tingkat mikro. Ini artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan LKM Syariah adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan dibawah kecil yang pada kenyataannya tidak bisa dijangkau oleh sistem perbankan. Maka dalam konteks ini LKM Syariah harus mengutamakan kelompok usaha yang layak dan tidak bankable. Ketika LKM Syariah beroperasi di wilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh LKM Syariah untuk anggotanya. Jadi, kalau dilihat dari sistem operasionalnya maka LKM Syariah tidak dapat disamakan dengan sistem bank (perbankan) tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh LKM Syariah. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017)
- g. Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Dalam konteks LKM Syariah adalah produk pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk nasabah dalam rangka pembangunan usaha dan pemberdayaan, yang dalam praktiknya dapat menggunakan akad ijarah maupun ju'alah (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNASBSM Umat, 2017)

h. Prinsip Syariah. LKM Syariah dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syariah. Maka dalam konteks ini menjadi suatu kewajiban bagi para pengurus atau direksi dan pengelola LKM Syariah mengetahui dan memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah dan setidaknya dalam LKM Syariah wajib adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali operasi LKM Syariah agar tidak keluar dan melakukan penyimpangan dari konsep syariah. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan POJK No. 12 Tahun 2014 STDD POJK No. 62 Tentang Kelembagaan, terdapat pilihan dua alternatif bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Berdasarkan karakteristik dan memudahkan persyaratan maka pesantren memilih badan hukum koperasi, dengan pilihan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya disebut koperasi LKM Syariah Pesantren.¹¹

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, LKM Syariah pesantren tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM Syariah secara penuh seperti versi UU No. 1 Tahun 2013, tetapi terdapat pembatasan di antaranya LKM Syariah pesantren tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung, baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri. Di samping itu, pembatasan lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi setara margin 3 % pertahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja, dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017).

Dengan adanya pembatasan–pembatasan di atas, maka LKM Syariah pesantren memiliki karakteristik tersendiri, antara lain adalah :

a. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip

- syariah.
- b. Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana (non deposit taking) dari masyarakat.
 - c. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren.
 - d. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
 - e. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.
 - f. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
 - g. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen 2.5– 3% pertahun.
 - h. Pembiayaan diberikan tanpa agunan. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017).

Dalam operasionalnya, LKM Syariah memiliki asas dan tujuan sebagai berikut

1). Asas

a. Keadilan.

Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari KM.

b. Kebersamaan. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama–sama untuk kepentingan bersama.

c. Kemandirian. Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak bergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumberdaya manusia maupun permodalan.

d. Kemudahan. Prosedur pembiayaan dalam LKM Syariah dibuat sesederhana mungkin.

e. Keterbukaan. Suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

f. Pemerataan. Pemberian pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau

seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

- g. Keberlanjutan. Suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- h. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017)

2). Tujuan

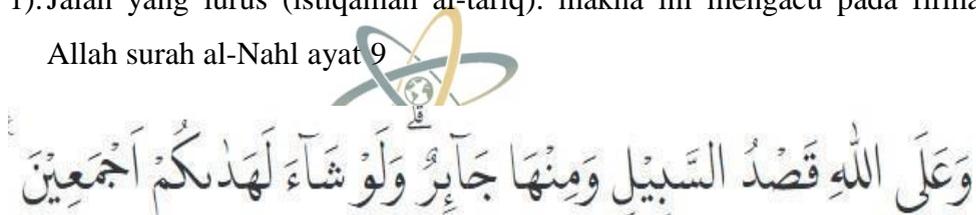
- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan /atau berpenghasilan rendah. (Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, 2017)

7. *Maqāṣid Syarī'ah.*

Islam merupakan agama yang komprehensif, sehingga banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya. Aturan dan hukum tersebut disampaikan melalui Al Quran dan hadits lewat perantara Rasulullah untuk menjadi pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Al Quran dan hadits disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Urgensitas *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut mendorong para ahli teori hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti darimaqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam

Islam harus bermuara kepada maslahat. (Shidiq Ghofar, 2009). Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* merangkum keseluruhan tujuan Syariah dalam bentuk yang lebih simpel dan mudah dipahami. Oleh karena itulah *Maqāṣid Syarī'ah* ini bisa dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan (Ahmad al-Risuni, 1999). *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang artinya “maksud dan tujuan”. Sedangkan *syariah* bermakna “hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”. Maqasid Syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata almaqasid dari akar kata al-qasd. Secara etimologi, al-qasd mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut:

- 1). Jalan yang lurus (istiqaamah al-tariq). makna ini mengacu pada firman Allah surah al-Nahl ayat 9



وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus.

Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata al-qasd adalah al-jair (jalan yang menyimpang).

- 2). Tujuan yang paling utama (al-ṭamad wa al-amm). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama ushul fiqh. Tujuan (al maqasid) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (al-maqasid). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar (Al Kailaniy, 2000).

a. Konsep Maqasid Syariah menurut Ibnu Asyur

Ibnu Asyur adalah tokoh *maqashid syariah* kontemporer kelahiran Tunisia. Ia dikenal dengan nama Ibnu Ashur, namun nama lengkapnya adalah Muhammad at Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin

Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur . *Ia* merupakan penerus sekaligus pelengkap konsep maqashid yang digagas oleh para pendahulunya seperti imam al Shatibi, al Ghazali, Izudin Bin Abd. Salam, Ibnu Ashur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Di antara karyanya yang monumental abad ini adalah *Maqashid as Syariah al Islamiyah* (Ushul Fiqh) dan *at Tahrir wa at Tanwir* (Tafsir). Selain itu masih ada judul lain yaitu *Ushul Nidham al Ijtimai' i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam), *Syarh al Muqaddimah al Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra).

Tujuan maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba.

- (1). Tujuan yang berhubungan dengan Hak-hak Allah.

Maksud dari tujuan yang berhubungan dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karenabisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya

- (2). Tujuan yang berhubungan dengan Hak-hak Hamba.

Maksud dari tujuan yang berhubungan dengan hak hamba adalah perbuatan - perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

- (3). Tujuan yang berhubungan dengan Percampuran antara hak Allah dan hak hamba.

Contoh percampuran ini adalah qishash, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Ta'ala mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja dibarengkan

dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja (Ibnu Ashur, 2001).

Ibnu Ashur membagi *maqasid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al amah* dan *maqasid al khasah*

1) . *Maqasid al amah*

Tujuan umum (*maqasid al 'amah*) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada-Nya serta *tawakkal* dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatandan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.(Habib, 2006). Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka,kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya (Muhammad 'Ali, 2007). Ibnu Ashur membatasi *maqasid al ammah* dengan empat syarat yaitu, (1) bersifat tetap (*al thubut*), (2) bersifat jelas (*al duhur*), yaitu bersifat jelas tidakmenimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah, (3) bersifat terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk, (4) bersifat *otentik (itrad)*, yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami dan istri. (Muhammad 'Ali, 2007)

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. *Maslahat* menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).(Ibnu Ashur, 2001). Ibnu Ashur membagi *maslahat* yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *shara'* menjadi empat bagian sebagai berikut:

(1). Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Dari segi ini maslahat terbagi menjadi daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Maslahat daruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu, yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada *kulliyat al khamsah*. Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan *maslahat al hajiyyat* adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari *maslahat al hajiyyat* adalah menjaga kehormatan. (Ibnu Ashur, 2001). *Maslahat tahsiniyah* adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. *Maslahat* ini merupakan sebab lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia. (Ibnu Ashur, 2001)

(2). Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu.

Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *maslahat al kulliyah*, dan *maslahat juz'iyah*. *Maslahat al kulliyah* adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat*. *Maslahat juz'iyah* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah. (Ibnu Ashur, 2001).

(3). Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan, terbagi atas :

- a. Maslahat *qat'iyah*, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar

atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar as Siddiq.

b. Maslahat Dzanniyah, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: *La yaqdi al qadi wa huwa ghadban* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).

c. Maslahat Wahmiah, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan., seperti mengkonsumsi narkoba.

(Al Hasani, 1995)

Sifat-sifat dari maqasid Syariah menurut Ibnu Ashur kembali pada empat sifat yaitu :

(1). Arahan fitrah bagi *Maqashid Syariah*

Sifat dasar fitrah adalah adanya sikap toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan, kebebasan. Dengan mengacu pada fitrah maka suatu hukum akan menjadi moderat, toleran yang mengedepankan kepentingan umum, artinya mudah diterima oleh khalayak umum dan memenuhi rasa keadilan. (Al Hasani, 1995) Mayoritas makna-makna hukum syariah khususnya hukum-hukum muamalah adalah mempunyai arti yang pasti dan jauh dari cabang, ia datang dengan redaksi umum. Karena itu maka seorang ahli fikih harus waspada bahwa hukum-hukum syariah menggunakan arti-arti terbatas sehingga kasus lain bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepadanya. Sifat umum ini menjadikan syariah sebagai ajaran yang sesuai bagi segala waktu dan tempat

(2). Merealisasikan dan memuliakan Syariah

Cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyiasati hukum,

menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan . (Al Hasani, 1995).

(3). Kuatnya Aturan dan Ketenangan Jiwa Merupakan Tujuan Syariah

Sifat ini bisa terealisasi dengan dua cara, pertama dengan cara ijtihad yaitu mempertimbangkan dalil-dalil shara' dan mencurahkan segala kemampuan untuk mengungkap maksud shari' (pembuat syariat), dan kedua dengan Rukhshah yaitu diberikan kepada orang yang mendapatkan kesulitan yang mengakibatkan berubahnya suatu hukum dari 'azimah menjadi rukhshah. (Al Hasani, 1995). Singkatnya Ibnu Ashur menetapkan *maqashid 'ammah* dengan membatasi empat sifat yaitu tetap (al thubut), jelas (al duhur), terukur (indhibat), dan otentik (ittirad).

2). *Maqashid al Khasah*

Tujuan syariah secara khusus dalam muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan *Maqāṣid asy-syari'ah* khusus yaitu tata cara yang diinginkan asy-*Syāri'* (Allah) untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam aktivitas mereka bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan fondasi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam hal ini setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariaan hukum hukum yang mengatur tindak tanduk manusia. Misalnya pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad rahn (gadai), menegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam pernikahan, dan menghindarkan mudarat yang berkelanjutan sebagai tujuan talak. (Ibnu Ashur, 2001)

Maqāṣid syari'ah yang bersifat khusus dalam hukum muamalah (Ibnu

Ashur, 2001) dalam *Ibnu 'Āsyūr* dibagi menjadi enam kategori, yaitu: hukum kekeluargaan, hukum perniagaan, hukum ketenagakerjaan, hukum tabarru'at, hukum peradilan dan kesaksian, serta hukum (sanksi) pidana. Pada masing-masing kelompok hukum terdapat *maqāṣid asy-syarī'ah* khusus yang menjadi acuan seluruh hukum parsial yang tercakup dalam masing-masing rumpun dimaksud. (Ibnu Ashur, 2001)

(1). *Maqāṣid Syarī'ah* Hukum Perkeluargaan.

Maqāṣid hukum perkeluargaan merupakan mengukuhkan ikatan pernikahan, mengukuhkan hubungan nasab, mengukuhkan hubungan persemendaan, dan menentukan tata cara pemutusan masing-masing hubungan. (Indra, 1970). Menurut Ibnu 'Āsyūr *maqāṣid Syarī'ah* hukum-hukum kekeluargaan merujuk kepada empat *maqāṣid* utama, yaitu: mengukuhkan ikatan pernikahan, mengukuhkan ikatan nasab kekerabatan, mengukuhkan ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan-ikatan tersebut dalam situasi tertentu. (Ibnu Ashur, 2001).

(2) *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Hukum Tata Niaga.

Harta atau kekayaan menurut Ibnu 'Āsyūr ialah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh individu, kelompok individu atau masyarakat umum untuk mewujudkan kemaslahatan pada pelbagai waktu, keadaan, dan kebutuhan. Harta bernilai kekayaan jika memenuhi lima kriteria: dapat disimpan dalam waktu lama, diminati, dapat dipindahtangankan, jumlahnya terbatas, diperoleh melalui usaha sendiri ataupun pemilik sebelumnya. Kekayaan umat dan individu-individunya bersumber berasal dari sumber: *tamalluk* (kepemilikan), dan *takassub* (penghasilan). *Tamalluk* atau *milkiyyah* menurut (Ibnu Ashur, 2001) adalah penguasaan terhadap sesuatu yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan secara langsung atau sebagai alat tukarnya. Sedangkan *takassub* yaitu usaha untuk mendapatkan suatu pemenuh kebutuhan melalui pekerjaan fisik atau negosiasi dengan pihak lain. Semua bentuk akad muamalat kekayaan

berkenaan dengan salah satu dari tamalluk dan takassub ini. Ibnu ‘Āsyūr mengemukakan lima *maqāṣid Syarī‘ah* khusus dalam perputaran kekayaan, yaitu: *ar-rawāj*, *Wudhuh* (transparansi), *Hifzh* (perlindungan terhadap harta), *Tsabat/Itsbat* kepastian hukum atas kepemilikan, dan *Adl* (berkeadilan). (Hamad al-‘Abdurrahmān al-Junaidil, 1983).

(3) *Maqāṣid Syarī‘ah* dalam Muamalat Ketenagakerjaan.

Harta kekayaan dihasilkan dari modal dan usaha atau kerja untuk memberdayakan modal tersebut. Kepemilikan modal kekayaan pada kenyataannya terbatas pada sejumlah individu masyarakat saja, tidak setiap individu memiliki harta yang cukup untuk dijadikan modal menghasilkan kekayaan berikutnya. Pada sisi lain individu-individu yang menguasai kekayaan yang berlimpah sebagai modal memiliki waktu dan kemampuan yang terbatas mendayagunakan hartanya itu secara produktif agar menghasilkan harta kekayaan baru. Mereka memerlukan orang lain untuk memproduktifkan harta kekayaan secara maksimal sebaliknya mereka yang memiliki keterbatasan modal membutuhkan harta guna memenuhi kebutuhan mereka, dan itu bisa diperoleh dengan bekerja memproduktifkan harta kekayaan pemilik modal dengan imbalan tertentu. Dengan demikian pemilik modal mendapat keuntungan berupa pertambahan harta kekayaan yang lebih signifikan, sedangkan pekerja mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan dapat menjadi pemodal baru. Ini diperbolehkan oleh syariat karena kebutuhan yang besar (*hājīyāt*) sebab kemasalahatannya tidak terbatas pada individu-individu tertentu tetapi juga bagi kemaslahatan umum. Relasi mutualisme antara kedua belah pihak menjadi fundamen pengayaan umat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr terdapat delapan *maqāṣid syarī‘ah* dalam berbagai jenis muamalah kategori ini yang harus dipedomani, yaitu: intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk garar ringan yang Sulit Dihindari, meminimalisir beban pekerja atau penggarap, berlaku mengikat jika aktivitas penggarapan telah dimulai pekerja atau penggarap dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran imbalan, memberi keleluasan mengenai cara penyelesaian pekerjaan, dan menghindari unsur

perbudakan. (Ibnu Ashur, 2001).

(4). *Maqāṣid Syarī'ah Hukum Tabarru'āt.*

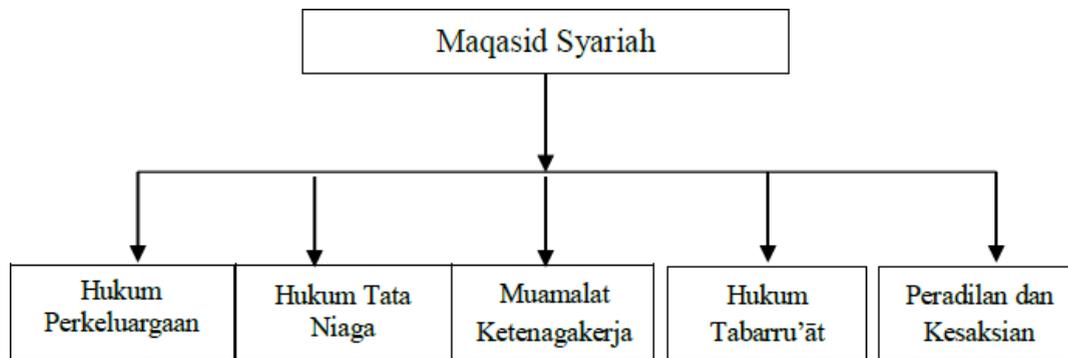
Tabarru'āt ialah pemberian suka rela yang didasari oleh semangat tolong menolong di antara individu-individu umat. (Ibnu Ashur, 2001). *Tabarru'āt* yang dimaksud oleh Ibnu Assyūr, antara lain, berupa sedekah yaitu pemberian yang diberikan tanpa imbalan dengan niat taqarrub kepada Allah oleh karena itu zakat disebut juga dalam Alqur'an *ṣadaqah*. Menurut Rāgib al-Aṣḥānīy jika wajib disebut zakat, jika suka rela disebut sedekah. Hibah adalah pemindahan kepemilikan atas harta tertentu atau tidak tertentu yang dapat diserahterimakan oleh seseorang yang diperkenankan melakukan tindakan hukum kepada orang lain pada saat masih hidup secara suka rela tanpa kompensasi. *ʿāriyah* adalah: membolehkan orang lain untuk memanfaatkan suatu benda bermanfaat yang dimiliki sedangkan bendanya tetap utuh, dikembalikan kepada pemilik setelah pemanfaatannya selesai. *ʿĀriyah* (meminjamkan) diperbolehkan berdasarkan nas Alqur'an dan Hadis serta ijmak ulama. *ʿĀriyah* dipandang memiliki nilai ibadah. *ḥabs* atau wakaf, *ʿumra* adalah sejenis hibah tetapi pemberi hibah menyaratkan hibah berlaku hanya selama penerima masih hidup, setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya karena adanya kontradiksi dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan *ʿUmrā*, Imam Malik termasuk yang membolehkannya berdasarkan hadis, “*al-muslim ʿalā syurūṭihim.*” dan memerdekakan budak. Menurut Ibnu ʿĀsyūr dalam syariat *tabarru'āt* ada empat *maqāṣid Syarī'ah* khusus, yaitu: intensifikasi *tabarru'āt*, sukarela, fleksibilitas, dan melindungi hak pihak lain yang terkait.

5) *Maqāṣid Syarī'ah Khusus Sistem Peradilan dan Kesaksian.*

Ibnu ʿĀsyūr menyistemisasi pemikirannya tentang *maqāṣid* khusus sistem peradilan menurut syariat Islam dalam tiga bagian, yaitu: *maqāṣid Syarī'ah* dalam lembaga peradilan, *maqāṣid Syarī'ah* dalam jabatan *qāḍiy* atau hakim, dan *maqāṣid Syarī'ah* dalam persaksian. (Ibnu Ashur, 2001)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka pembagian *maqāṣid syarī'ah* Ibnu

‘Āsyūr dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 9. Bagan Maqāṣid Syariah Ibnu ‘Āsyūr

B. Kajian Terdahulu

Penelitian ini merupakan lanjutan dari berbagai kajian dan tulisan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dengan menggali apa-apa yang sudah dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk jurnal-jurnal, artikel, buku, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas lembaga keuangan syariah. Hasil penelusuran literatur yang dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Rachmah Damayanti, judul penelitian Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis(DEA), (2018). Variabel input yang digunakan Beban Personalia(X1), Aktiva Tetap (X2) dan Dana Pihak Ketiga (X3) dan Variabel Outputnya Pembiayaan yang diberikan (Y1), Pendapatan non operasional (Y2) dan Aktiva Lancar(Y3). Analisis yang digunakan Deskriptif dan hasil dari penelitian yaitu berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode DEA yang berasumsikan Constant Return to scale (CSR), diketahui bahwa Inefisiensi yang dialami oleh BPRS disebabkan oleh kelebihan input pada beban personalia serta kurangnya output pada pembiayaan yang diberikan
2. Solikah & Yunita Umi, judul penelitian Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia di Kabupaten Klaten, (2010). Variabel yang

digunakan adalah Biaya modal, manajemen, jumlah manajer, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Analisis yang digunakan metode data envelopment anaysis (DEA). Hasil dari penelitian yaitu hasil analisis menyatakan bahwa penyebab inefisiensi tersebut berasal dari input yang tidak sesuai dengan kebutuhan . Biaya manajemen menjadi penyebab terbesar dari inefisiensi dalam koperasi

3. M. Mahbubi Ali Ascarya, judul penelitian Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (studi kasus pada BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri, (2010). Variabel input yang digunakan adalah beban bagihasil (X1), biaya personalia (X2), dan beban umumdan administrasi(X3), Faktor-faktor output dari kegiatan operasionalnya berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) (Y1), jumlah pembiayaan yangdisalurkan (Y2), pendapatan laba usaha (Y3), dan pendapatan operasional lain-lain (Y4). Analisis yang digunakan *two stage data envelopment analysis* dan hasil dari penelitian yaitu hasil penghitunganDEA menunjukkan,efisiensi overall technical BMT MMU (0,84) dan BMT UGT (0,88) pada tahun 2008 masih kurang optimal. Penyebab utama inefisiensi untuk BMT MMU adalah penyaluran pembiayaan, sementara sumber utama inefisiensi BMT UGT adalah penghimpunan dana pihak ketiga yang kurang maksimal. Hasil pengolahan Tobit menunjukkan bahwa kekuatan modal dan ukuran BMT memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi overall technical pada dua BMT. Sementara dari sisi eksternal, PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif secara signifikan. Adapun pertumbuhan pengangguran, tingkat pendidikan, dan komitmen keberagamaan tidak berpengaruh secara signifikan.
4. Dr. Ir. Sudar Madji, MM dan Dr.Ir. Mamik Suendarti, MS, judul peneltian Pengukuran Dan Perbandingan Efisiensi Koperasi Simpan Pinjam Milik Masyarakat Umum di Jakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA), (2019). Variabel dalam penelitian ini adalah Anggota, total Modal biaya operasi laba, total aset, pinjaman pembayaranutang. Analisis yang digunakan kualitatif dan hasil penelitian yaitu Ada 11 koperasi simpan pinjam masih belum efisien, tetapi ada 4 koperasi dari 11 koperasi yang telah mencapai efisiensi 100 persen, dan menunjukkan bahwa

koperasi di Jakarta belum mencapai tingkat efisiensi penuh, namun, tingkat efisiensi kedua jenis koperasi tidak terlalu rendah dan beradapada tingkat yang memuaskan berdasarkan nilai rata-rata yang dihasilkan dari dua metode yang digunakan. Secara khusus, temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi menggunakan metode DEA dalam koperasi simpan-pinjam milik masyarakat di Jakarta adalah kategori yang cukup baik.

5. Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana, judul penelitian Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah), (2019). Variabel yang digunakan adalah nilai pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah (X) dan variabel endogen adalah kemiskinan yang dilihat dari pendapatan nasabah (Y). Hasil penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro khususnya LKMS Denanyar Sumber Barokah efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa BWM telah mempengaruhi perkembangan usaha nasabah melalui nilai pembiayaan dan adanya layanan pendampingan usaha oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah.
6. Surender Singh, S.K Goyal Supran dan Kumar Sarma, judul penelitian Technical Efficiency and Determinants in Microfinance Institution in India a Firm Level Analysis, (2013). Variabel yang digunakan adalah total aset, umur LKM, debt equity ratio, Total jumlah peminjam aktif, Return on asset (ROA), operasional peminjam per staf. Hasil penelitian yaitu temuan menunjukkan bahwa ada 5 LKM yang efisien, 25 LKM mewujudkan skala ekonomi di bawah efisiensi berorientasi input sedangkan hanya 10 LKM di bawah efisiensi berorientasi output. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menetapkan bahwa perusahaan baru juga dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan fundamental yang kuat, kebijakan rasional dan manajemen. LKM harus lebih berkonsentrasi pelayanan kepada pelanggan dibandingkan kepada karyawan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi.
7. Haq et al, judul penelitian *Efficiency of Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis*, (2010). Analisis yang digunakan *data envelopment analysis* dan hasil penelitian yaitu dari 39 lembaga keuangan mikro penyediaan

pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin untuk proyek-proyek wirausahayang menghasilkanpendapatan di seluruh Afrika, Asia dan Afrika hasil yang diperoleh mengungkapkan bahwa lembaga keuangan mikro non-pemerintah dengan pendekatan produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan lembaga bank keuangan mikro dengan pendekatan intermediasi.

8. Sunil Kumar dan Rachita Gulati, judul penelitian *Measuring efficiency, effectiveness and performance of Indian public sector banks*, (2009). Variabel yang digunakan adalah stage I, input : labour, Loanable funds, Physical Capital. Output : Advances, investments. Stage II, input : Advances, investments. Output : Net Interest Income. Analisis yang digunakan *data envelopment analysis*. Dari hasil penilaian efisiensi, efektivitas, dan kinerja 27 sektor bank umum (PSB) operasi di India dengan menggunakan dua tahap model evaluasi kinerja menghasilkan bahwa efisiensi yang tinggi tidak berarti juga menunjukkan untuk efektivitas yang tinggi dalam industri LKM India.
9. Erasmus Kipesha, judul penelitian *Production And Intermediation Efficiency Of Microfinance in Tanzania*, (2013). Variabel input yang digunakan assets, capital and personnel dan variabel output Loan portfolio, Financial revenue, The number of loans channeled to the clients. Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis dan hasil penelitian yaitu dari 29 lembaga Keuangan Mikro di Tanzania, LKM produksi mempunyai efisiensi teknis rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan LKM intermediasi penelitian ini merekomendasikan bahwa LKM di Tanzania harus mengurangi biaya operasi, meningkatkan pendapatan dan alokasi sumber daya mereka dalam meningkatkan efisiensi intermediasi karena tujuan utama LKM tersebut adalah meningkatkan pendapatan orang miskin.
10. Bereket Zerai Gebremichael dan Hailemichael Tesfay Gessesse, judul penelitian *Technical efficiency of Microfinance Institutions (MFIs)*, (2016). Variabel yang digunakan adalah Number of loan outstanding Assets, Operating, expenses, Personnel/Employees. Analisis yang digunakan parametrik dan non parametrik dan hasil penelitian yaitu dari 134 LKM yang beroperasi di 36 negara Afrika secara teknis tidak efisien dan ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam kinerja efisiensi di antara berbagai jenis

kepemilikan LKM. Lebih penting lagi, LSM dan lembaga keuangan non-bank relatif lebih efisien, sedangkan serikat pekerja / kredit adalah yang paling tidak efisien.

11. Moussawi Obeid, judul penelitian *Evaluating the Productive Efficiency of Islamic Banking in GCC: A Non Parametric Approach*, (2010). Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu Inefisiensi teknis dan inefisiensi alokatif meningkatkan biaya bank rata-rata sekitar 14% dan 29% masing-masing. Selain itu, hasilnya menunjukkan faktor internal dan eksternal tampaknya berkontribusi signifikan terhadap evolusi efisiensi sejumlah bank syariah yang beroperasi di wilayah GCC.
12. Said, judul penelitian *Efficiency in Islamic Banking during a Financial Crisis- an Empirical Analysis of Forty-Seven Banks*, (2012). Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu efisiensi Bank syariah beroperasi di Timur Tengah dan non Timur Tengah meningkat selama krisis ekonomi.
13. Miranti Sari, judul penelitian *Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*, (2016). Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia masih dikategorikan tidak efisien atau belum optimal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
14. Andri Lestari dan Nurul Huda, judul penelitian *Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Pendekatan Data Envelopment Analysis (Dea) (Periode 2015-2019)*, (2020). Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu tingkat efisiensi Bank Umum Syariah milik pemerintah Daerah lebih rendah dari rata-rata efisiensi Bank Umum Syariah Nasional baik secara overall (CRS) dan teknis (VRS). Perbedaan efisiensi antara Bank Umum Syariah milik pemerintah daerah dengan Bank Umum Syariah nasional periode 2015-2019 tidak signifikan, hal ini terlihat dari nilai $\text{sig} > 0,05$.
15. Fadhil Ahmad Firdaus, judul penelitian *Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA)*, (2017). Variabel input yang digunakan adalah aset tetap, simpanan, biaya operasional dan variabel output

pembiayaan, laba operasional. Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 12BPRS wilayah Jabodetabek periode 2015-2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efisiensi yang fluktuatif. Sementara itu, tahap kedua pengujian menggunakan regresi Tobit menunjukkan bahwa hanya variabel faktor internal yaitu CAR yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi BPRS wilayah Jabodetabek.

16. Nico Ferrari dan Heri Sudarsono, judul penelitian Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), (2011). Variabel input yang digunakan adalah Ekuitas Dana Simpanan Wadiah/Giro Beban Operasional dan variabel output Kas, Pembiayaan Pendapatan Operasional Lainnya. Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu tingkat efisiensi bank syariah fluktuatif dari waktu ke waktu dalam efisiensi dengan pendekatan intermediasi, bank konvensional lebih efisien dari pada banksyariah.
17. Arif Ramadhan, Didit Purnomo dan Mhd Muhtarom Chuzaimah, judul penelitian Mengukur Tingkat Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), (2017). Variabel input yang digunakan tabungan wadiah, tabungan mudharabah, beban personalia dan variabel output piutang, penempatan pada bank lain. Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada Triwulan I tahun 2016 terdapat 4 BPRS yang telah efisien. Pada Triwulan II tahun 2016 terdapat 3 BPRS yang telah efisien. Pada Triwulan III tahun 2016 terdapat 3 BPRS yang telah efisien. Pada triwulan IV tahun 2016 terdapat 3 BPRS yang telah efisien. Selama periode 2016 (Triwulan 1– Triwulan IV) terdapat 3 BPRS yang selalu mengalami efisien yaitu BPRS Dana Amanah BPRS Dana Mulia, BPRS Harta Insan Karimah. Sedangkan BPRS Central Syariah Utama mengalami inefisiensi pada Triwulan II-Triwulan IV tahun 2016.
18. Inne Handayani, judul penelitian Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), (2016). Variabel input yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga

(DPK) Biaya Operasional Lainnya dan variabel output Pembiayaan, Aktiva Lancar, Pendapatan Operasional Lainnya. Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil perhitungan DEA pada tahun 2011 terdapat 5 BPRS yang efisien, 14 BPRS pada tahun 2012, 13 BPRS pada tahun 2013, 10 BPRS pada tahun 2014 dan 9 BPRS pada tahun 2015, dan ada 2 BPRS yang konsisten memiliki kinerja yang efisien dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Variabel dengan potensi pengembangan terbesar yaitu variabel pendapatan operasional lainnya sebesar 67-77%, kemudian variabel aktiva lancar sebesar 37-46% dan variabel pembiayaan sebesar 32-41%.

19. Ahmad Azhari Pohan, judul penelitian Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia, (2015). Variabel input yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional Lainnya dan variabel output Pembiayaan, Aktiva Pendapatan Operasional Lainnya. Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu hasil penelitian menunjukkan pada setiap BUS memiliki kinerja yang efisien. Berbeda dengan BPRS, dari 113 BPRS hanya 19 BPRS yang memiliki kinerja yang efisien. Hal ini mengakibatkan rendahnya rata-rata nilai efisiensi BPRS. Variabel dengan potensi pengembangan terbesar adalah variabel pembiayaan sebesar 68-73%, kemudian variabel aktiva lancar sebesar 58-62% dan variabel pendapatan operasional lainnya sebesar 6-65%.
20. Aliyu Yusof, judul penelitian *Profitability and Cost Efficiency of Islamic Banks: A Panel Analysis of Some Selected Countries*, (2016). Analisis yang digunakan model logit dan hasil penelitian yaitu memprioritaskan efisiensi biaya yang memiliki kecenderungan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan pengembalian yang lebih tinggi memuaskan semua pemangku kepentingan.
21. Mala Rodoni Yaman, judul penelitian *Market Power and Efficiency of Islamic Banking and Conventional Banking in Indonesia*, (2018). Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil penelitian yaitu

perbankan Indonesia memiliki kekuatan pasar dalam menentukan harga dan skala efisiensi tidak mempengaruhi profitabilitas, konsentrasi, dan pangsa pasar secara bersamaan.

22. Masita G, judul penelitian *Determinan Efisiensi Perbankan di Indonesia Berdasarkan Data Envelopment Analysis (DEA)*, (2014). Variabel yang digunakan adalah faktor kepemilikan saham oleh asing, tingkat kesehatan bank, non-performing loan, dan ukuran bank sebagai determinan dari efisiensi teknis bank. Analisis yang digunakan regresi linier dan hasil penelitian yaitu kepemilikan saham oleh asing dan tingkat kesehatan bank terbukti berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis, variabel *non-performing loan* juga terbukti berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis. Sedangkan, variabel ukuran bank memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi teknis.
23. Sangaji, judul penelitian *Analisis Determinan Efisiensi Perbankan di Indonesia Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia)*, (2016). Variabel yang digunakan adalah Return On Assets (ROA), Skala usaha yang diproksikan dengan kepemilikan cabang, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans (NPL). Analisis yang digunakan regresi linier dan hasil penelitian yang didapat adalah ROA dan CAR berpengaruh positif terhadap efisiensi perbankan. Skala usaha yang diproksikan oleh kepemilikan cabang dan NPL terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap efisiensi.
24. Purwoko dan Sudiyatno, judul penelitian *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empirik Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia)*, (2013). Variabel yang digunakan adalah BOPO), resiko kredit (NPL), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR). Analisis yang digunakan regresi linier dan hasil penelitian yaitu Tiga faktor yang mempengaruhi kinerja bank (ROA), yakni efisiensi operasi (BOPO), resiko kredit (NPL), dan resiko pasar (NIM), sedangkan permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR) tidak berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA).
25. Nyankomo Marwa dan Meshach Aziakpono, judul penelitian *Technical And Scale Efficiency Of Tanzanian Saving And Credit Cooperatives*, (2016). Analisis yang digunakan metode data envelopment analysis (DEA) dan hasil

penelitian yaitu Studi saat ini meneliti efisiensi teknis 103 tabungan dan kredit Koperasi dari Tanzania menggunakan DEA. Temuan empiris menunjukkan Bahwaefisiensi teknis rata-ratasekitar 42%, rata-rata efisiensi teknis bersih adalah 52%, dan efisiensi skala adalah 76%. Kebanyakan perusahaanberusaha dengan cara memanfaatkan secara efisien sumber daya mereka untuk memaksimalkan output.

26. Louis, P & Baesens, B (2013) dengan judul penelitian, '*Do for profit microfinance institutions achieve better financial efficiency and social impact? A generalized estimating equation panel approach*'. Artikel ini berkontribusi pada literatur dengan menyelidiki manfaat potensial dari komersialisasi keuangan mikro. Dua jenis peningkatan yang mungkin mengejar profitabilitas diselidiki menggunakan set data longitudinal yang komprehensif yang mencakup 15 periode dan mencakup 456 lembaga keuangan mikro (LKM). Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja persamaan estimasi umum untuk mengoreksi korelasi dalam setiap cluster. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro beroperasi tidak efisien secara finansial . Sehubungan dengan dampak sosial, kedalaman penjangkauan yang lebih rendah dan penjangkauan yang lebih rendah terhadap perempuan
27. Ferdousi F. (2013), dengan judul penelitian "*Performance of microfinance institutions in Asia. DEA based efficiency analysis*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kinerja komparatif lembaga keuangan mikro (LKM) di tiga negara Asia yaitu Bangladesh, India dan Cina. Berdasarkan analisis data, praktik terbaik LKM diidentifikasi dan faktor yang mempengaruhi efisiensinya juga telah diselidiki dengan menggunakan analisis regresi TOBIT. Temuan mengungkapkan bahwa LKM di Cina dan India berkinerja lebih efisien dari pada Bangladesh di bawah pengembalian teknologi skala yang konstan tetapi di bawah variabel kembali ke teknologi skala LKM di Bangladesh berkinerja lebih efisien daripada yang lain. Selain itu, analisis regresi menegaskan bahwa kinerja LKM dalam hal total aset dan kinerja keuangan dalam hal profitabilitas sangat penting untuk pengembangan LKM yang berkelanjutan dan efisien.

28. Abayie E.F.O., Amanor K., Frimpong M. (2011), dengan judul penelitian “*The Measurement and Determinants Of Economic Efficiency Of Microfinance Institutions In Ghana. A Stochastic Frontier Approach.* Penelitian ini menyelidiki secara empiris efisiensi ekonomi lembaga keuangan mikro di Ghana dengan menggunakan Model Stokastik Cobb-Douglas. Sebanyak 135 Lembaga Keuangan Mikro diambil sampelnya untuk periode 2007-2010.. Perkiraan hasil menunjukkan efisiensi ekonomi rata -rata keseluruhan 56,29%; yang menunjukkan tingkat inefisiensi yang tinggi dalam perilaku unit ekonomi dalam sebuah industri. Studi ini semakin mengungkap bahwa indikator usia Lembaga Keuangan dan tabungan dan biaya per peminjam adalah penentu yang signifikan dari efisiensi ekonomi. Oleh karena itu disarankan agar para praktisi meningkatkan program pelatihan teknis, mengoperasikan produk tabungan yang beragam untuk meningkatkan kualitas portofolio dan memastikan keberlanjutan; dan juga meningkatkan tingkat komitmen sosial untuk staf dan klien.
29. Tahir I.M., Tahrim S.N.C. (2013), judul penelitian “*Efficiency Analysis Of Microfinance Institutions in ASEAN, DEA approach.* Penelitian ini akan membandingkan efisiensi LKM di negara-negara ASEAN dengan menggunakan Data Envelopment Analysis. Lima negara di ASEAN yang akan dijadikan sebagai sampel adalah Indonesia, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Laos. Periode penelitian dari 2008 hingga 2010. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro di Vietnam relatif lebih efisien daripada negara lainnya dengan tingkat efisiensi 87,6% pada 2008 dan 2009, 90,8% pada 2010 dan 91,3% pada 2011..Lembaga keuangan mikro di LAOS ditemukan paling tidak efisien yaitu 45% pada 2008,43,8% pada 2009, 60,8% pada 2010 dan 62,5% pada 2011). Di Indonesia, efisiensi teknis murni lebih rendah dari tingkat efisiensi skala., Lembaga keuangan mikro di negara Kamboja, Filipina tidak efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya.
30. Santa Kar, Joyeeta Deb (2017), judul penelitian “ *Efficiency determinants of*

microfinance Institutions in India: two stage DEA analysis, Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan mikro di India dengan menggunakan Analisis Data Envelopment (DEA) dengan dua model DEA (Model berorientasi input dan model BCC berorientasi output. Selanjutnya, untuk memeriksa Faktor -faktor yang mempengaruhi efisiensi LKM dan khususnya untuk menjawab apakah keberlanjutan memiliki apapun Dampak signifikan pada efisiensi, regresi tobit diterapkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah 31 Lembaga Keuangan mikro selama tujuh tahun(2009-2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi teknis rata -rata LKM diperkirakan 79 % di bawah model BCC berorientasi input dan 98 % pada model BCC berorientasi output.

31. Ageng Prasetyo, Jaenal Effendi, Titta Nursyamsiah, (2018), judul :*The Effectiveness of Islamic Microfinance Distribution on Microbusiness Owner's Poverty Alleviation (Case Study: BMT Bina Masyarakat Purworejo)*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas distribusi keuangan mikro Islam dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan pemilik mikro di Purworejo. Studi menggunakan metode analisis deskriptif yang merupakan skala likert dan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan lembaga keuangan mikro Islam kinerja bisnis mikro. Dampak pada pengentasan kemiskinan ditunjukkan oleh perubahan pendapatan pemilik mikro. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam dianggap efektif dalam beberapa aspek, mereka adalah aspek proposal, aspek pencairan, aspek pemanfaatan, dan aspek pembunahan pembiayaan. Selain itu, Keuangan Mikro Islam memiliki dampak positif pada kinerja bisnis mikro dan pengentasan kemiskinan
32. M. Miazur Rahman (2010), judul penelitian "*Islamic Micro Finance Programme And Its Impact On Rural Poverty Allevation*", "Makalah ini menyajikan temuan pada percobaan ini menggunakan 1.020 tanggapan dalam survei sampel. Hasilnya menunjukkan bahwa klien yang signifikan telah meningkatkan pengamatan keagamaan mereka seperti doa dan puasa. Hasil model ekonometrik menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga,

produktivitas tanaman dan ternak, pengeluaran dan pekerjaan meningkat secara signifikan karena influre perubahan perilaku dan ketersediaan mikro-finance. Klien menyatakan bahwa investasi mikro telah memberikan organisasi yang lebih baik dari kegiatan ekonomi mereka. Akhirnya, program investasi mikro Islam tampaknya memacu perilaku yang lebih etis dan diinginkan secara ekonomi yang mengarah pada pengentasan kemiskinan.

33. Chen Zheng, (2020), dengan judul penelitian “*The impact of COVID-19 on the efficiency of microfinance institutions*” , Studi ini menyelidiki efek penurunan aktivitas ekonomi yang diinduksi COVID-19 pada efisiensi keuangan dan sosial lembaga keuangan mikro (LKM). Temuan penelitian ini adalah bahwa dampak yang diinduksi pandemi mengurangi efisiensi keuangan LKM; Namun, efisiensi sosial LKM meningkat di bawah dampak COVID-19. Penawaran dan permintaan pendanaan LKM merupakan faktor yang potensial yang mengakibatkan inefisiensi dengan adanya wabah COVID-19. Jumlah pinjaman memediasi hubungan antara dampak efisiensi COVID-19 dan LKM, sedangkan peran mediasi untuk jumlah pendanaan dapat diabaikan.
34. Kekoura Sakouvogui, (2021), dengan judul penelitian “*How are the United States Banks faring during the COVID-19 Pandemic? Evidence of Economic Efficiency Measures*,. Penelitian ini menguji pentingnya likuiditas dan solvabilitas keuangan pada efisiensi bank komersial dan domestik AS selama Covid-19. dan menguji apakah bank komersial dan domestik AS secara aktif mengelola posisi likuiditas dan solvabilitas mereka selama pandemi COVID-19. Makalah ini mengadopsi estimator Data Envelopment Analysis dalam prosedur dua langkah.. Temuan empiris menunjukkan bahwa risiko likuiditas dan solvabilitas secara negatif mempengaruhi ukuran efisiensi ekonomi bank selama pandemi Covid-19.
35. Paula Sierra Abella, 2021, *The Impact of COVID-19 on the Microfinance Sector, Universidad Pontificia de Comillas - ICADE E4 – Lancaster University* , Temuan penelitiannya dalah bahwa Pandemi Covid-19, sebagian besar, berdampak negatif terhadap keuangan mikro sektor. Setelah analisis survei

sekunder dan penelitian sebelumnya, terbukti bahwa Pandemi memiliki dampak besar pada meningkatnya kemiskinan, pendapatan yang lebih rendah dan berbagai macam Pembatasan pemerintah di seluruh dunia. Pinjaman menjadi lebih berisiko dan lebih default Sering, dengan hanya beberapa LKM yang dapat menggunakan langkah-langkah restriktif untuk keuntungan mereka. Mengingat hal di atas, kebutuhan untuk layanan yang disesuaikan, inovasi digital dan memasuki baru Pasar bisa dibidang langkah selanjutnya yang harus diikuti sektor ini untuk beradaptasi dan mengatasi arus tantangan.

36. A.W. Ainol-Basirah^{1, 2} and A.K. Siti-Nabiha (2020) dengan judul “*The Roles Of Islamic Social Finance In The Era Of Post Covid-19 Possible Prospect Of Waqf Institution For Economic Revival*”, Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran dari proyek waqf saat ini dan pendapatan kegiatan generasi oleh institusi waqf di Malaysia dan untuk lebih lanjut menganalisa peran yang waqf lembaga dapat bermain, bersama dengan potensi prospek mereka, dalam membantu menstabilkan ekonomi perjuangan dihadapi selama periode pasca-Ovid-19, terutama di antara kelompok-kelompok rentan dari orang-orang dan masyarakat bebas. Temuan menunjukkan bahwa saat ini ada kemajuan positif dan perkembangan dalam waqf proyek, meskipun beberapa penyesuaian harus memenuhi kebutuhan masyarakat di pasca-pandemi titik. Model waqf saat ini, secara khusus in *cash waqf initiative*, perlu ditingkatkan untuk diijinkan untuk implementasi dari rencana kelangsungan hidup ekonomi yang komprehensif melalui instrumen waqf

37. Taufik Faturrohman, Muammar Farras Ar Rasyid, at all (2020), dengan judul “ *The Potential Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic , Review of Integrative Business and Economics Research*”, Sejak wabah Covid-19 pada akhir 2019, lebih dari 200 negara sudah terinfeksi. Virus ini menyebabkan bukan hanya krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. Banyak negara-negara jatuh ke dalam resesi dan banyak orang jatuh di bawah tingkat kemiskinan. The pemerintah mungkin tidak cukup kuat untuk membawa ekonomi kembali ke jalurnya. Karena itu, semua sumber daya, termasuk waqf, harus sinergized untuk mengatasi krisis. Waqf adalah Islam

Sosial keuangan yang secara luas dipraktekkan di negara-negara mayoritas Moslem. Waqf fungsi mengungkapkan potensi dan manfaat ekonomi dari aset waqf untuk ibadah dan lainnya kemakmuran masyarakat. Selain itu, waqf dapat di manfaatkan untuk jembatan pembiayaan dan bisa juga digunakan untuk membuat jaring keselamatan sosial. Penelitian ini menyelidiki potensi dan aplikasi institusi waqf di Bank Pengembangan Islam (IDB) dan negara-negara seperti Mesir, Kuwait, Malaysia, dan Indonesia. Penelitian menemukan bahwa wahqf dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui penggunaan aset waqf untuk banyak tujuan, seperti pendidikan dan infrastruktur. Kami juga menemukan bahwa aplikasi waqf online dapat mengoptimalkan waqf potensi di era normal baru ekonomi yang tidak stabil.

38. Noor Mahinar Abu Bakar, Noor Hainiakmal Abu Bakar, Norhashimah Mohd Yasin,(2020) *The Contemporary Role of Tabung Haji Malaysia in Fulfilling Sustainability via Islamic Social Finance*,. Makalah ini dilakukan untuk memeriksa sejarah, tujuan dan strategi berkelanjutan dari yang memastikan kelangsungan hidup jangka panjangnya, ketahanan dan kontribusi Islam Keuangan Sosial (ISF). Studi ini menggunakan Metode Penelitian Pustaka kualitatif yang khusus mengacu pada laporan keuangan (2010-2018),dokumen, jurnal dan teks mengenai aktivitas para penulis dan penulisnya sendiri, untuk menguji bagaimana mereka beradaptasi dengan pengetesan baru Covid-19 (C19) tantangan via ISF. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun Tabung Haji memberikan contoh yang baik sebagai lembaga haji yang kompeten di seluruh dunia tidak etis politik dan gangguan eksternal pada manajemen dan pengambilan keputusan yang tidak pantas tekanan pada TH untuk membuat keputusan-termotivasi politik menghasilkan konflik kepentingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam waktu C19 lansekap baru, TH harus memimpin di ISF, menemukan kembali sebagai efektif organisasi pandemi dan mengadopsi konon teknologi untuk kelangsungan hidup bisnis. Penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap tujuan bisnis dan relevansinya TH jika mereka untuk meningkatkan citra mereka dan berkontribusi untuk pembangunan ISF yang berkelanjutan.

39. Inggritia Safitri M, Nurul Huda (2020), *Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (Covid 19 In Indonesia)*, Dampak Covid 19 berpengaruh besar bagi lembaga keuangan, hingga masyarakat menengah kebawah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan *ISF* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik riset kepustakaan. Zakat dengan cepat dapat dilakukan pengumpulan dana untuk program bantuan pangan, kesehatan, dan program konsumtif lainnya, sehingga zakat dapat mengatasi krisis pangan pandemi Covid 19. Sedangkan jangka panjang zakat dioptimalkan dalam program pendidikan dan ekonomi. Infaq dan sedekah dapat diperoleh langsung secara tunai dari unit pengumpul zakat dan masyarakat. Instrumen wakaf lebih diperuntukkan dalam periode jangka panjang, terutama wakaf uang dalam bentuk *Cash Waqf Linked Sukuk* menarik wakif untuk berwakaf dan berinvestasi mengembangkan infrastruktur. Penelitian menyimpulkan *ISF* menjadi solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid 19 dengan memplotkan instrumen tersebut dalam jangka pendek, dan panjang. Sehingga masyarakat teratasi secara optimal, dan perekonomian dapat bertahan dan mengalami pertumbuhan kembali secara normal.
40. Wasiaturrahma , Raditya Sukmana , Shochrul Rohmatul Ajija , Sri Cahyaning Umi Salama , Ahmad Hudaifah Financial , (2020) dengan judul penelitian *“Performance Of Rural Banks in Indonesia: A two-stage DEA Approach*, Heliyon 6. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja efisiensi bank pedesaan konvensional dan Islam di Indonesia, Secara khusus, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menggunakan pendekatan DEA, Hasilnya menunjukkan bahwa BPR dan BPRS masih tidak efisien dalam hal peran intermediasi tetapi efisien dalam produksi. Selain itu, estimasi Tobit menunjukkan bahwa kedua hasil efisiensi ini dipengaruhi secara positif oleh Lokasi dan rasio kecukupan modal (CAR). Bank -bank pedesaan yang beroperasi di kota -kota ini cenderung memiliki

tingkat yang lebih tinggi efisiensi dari sebaliknya. Selain itu, semakin besar modal semakin efisien baik bank Islam dan konvensional di pedesaan baik dalam pedekatan produksi dan intermediasi.

41. Waqar Akram, Syedah Shan, Suman Shaikh, Ubaid Ullah Yashkun , (2016), dengan judul “*Determinants of Microfinance Institutions’ Efficiency in South Asia during Financial Crisis: A Two-Stage Analysis*”. Studi ini meneliti perkembangan dan penentu utama efisiensi lembaga keuangan mikro di wilayah Asia Selatan selama periode krisis keuangan untuk tahun 2008 dan 2009. Analisis data menggunakan DEA) .Hasil pertama menyimpulkan bahwa Asia Selatan Lembaga Keuangan Mikro di Asia Selatan mengalami inefisiensi rata -rata 20,15% dan 12,2% dan untuk efisiensi teknis (TE), dan teknis murni Efisiensi (PTE) masing -masing untuk periode studi. Selanjutnya, faktor utama peningkatan efisiensi lembaga mikro adalah peminjam per staf, kematangan lembaga keuangan mikro, pinjaman kecil ,rasio portofolio dan penghapusan; Di sisi lain, keuangan lainnya layanan, metodologi pinjaman individu dan sifat lembaga
42. Farida Farida , Irwan R. Osman , Agus Kurniawan Lim , Nur Wahyuni, dengan judul “*Efficiency of Formal Microfinance in Indonesia: Using Data Envelopment Analysis Application*”. Salah satu faktor keberhasilan utama lembaga keuangan Keberlanjutan adalah efisiensi operasional. Dengan menggunakan metode DEA), makalah ini mengukur efisiensi relatif dari unit perbankan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data sampel dari penelitian ini diperoleh dari semua unit perbankan yang menyediakan Kur yang berlokasi di kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan penerima KUR terbesar. Studi ini terdiri dari dua tahapan Analisis: (1) Ditemukan bahwa 18 dari 35 unit perbankan (51,43%) berada dalam efisiensi skala, (skor efisien adalah 100%), (2) Target output ditampilkan untuk tujuan memaksimalkan output pencairanKUR tanpa input tambahan
43. Shifa Mohd Nor,2016, dengan judul, *Islamic Social Bank: An Adaptation of*

Islamic Banking, hasil penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi sosial yang dilakukan oleh Bank Islam, belum mengembangkan cara yang sistematis kepada masyarakat untuk meningkatkan sosial ekonomis, dan hanya berkontribusi pada pengembangan individu. Biasanya, kegiatan seperti itu melibatkan amal atau sadaqah, tapi lebih baik kalau kegiatan ekonomi dibuat terstruktur yang menjamin keberlanjutan. Islamic bank masih berfokus pada kelompok secara finansial. Terlebih lagi, implementasi dari konsep qard al-hassan (apasure loan) masih dalam diskusi yang mendalam sejak Bank Islam meramalkan bahwa metode ini berisiko, sementara microfinance tidak dipraktekkan secara luas walaupun dukungan dari pemerintah.

44. A.W. Ainol-Basirah, A.K. Siti-Nabiha (2020), dengan judul, *The Roles Of Islamic Social Finance In The Era Of Post Covid-19: Possible Prospects Of Waqf Institutions For Economic Revival*, hasil penelitiannya, melalui Islam Sosial Keuangan instrument yaitu wakaf, memberikan prospek bagi lembaga waqf untuk memulai, dan juga bertindak sebagai katalis untuk perubahan nilai sosial dengan menerapkan peran utama kebaikan dalam membantu satu sama lain, dan tindakan yang sangat tegas dari orang kaya membantu orang miskin melalui sumbangan waqf. Nilai ini harus dicetak dalam masyarakat sebagai pelajaran yang dipelajari dari krisis kesehatan dan ekonomi global yang tidak dapat diselesaikan sambil karena masih adanya ekonomi yang kapitalis yang bersifat individualis.
45. Muhammad Ash-Shiddiqy, (2018), *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di LKMS Almuna Berkah Mandiri, DI Yogyakarta*, hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa telah sesuai dengan prinsip syariah, karena akad qardh ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat, dimana status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (Muqayyadah) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam

mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Kepesantren Indonesia (KUMPI).

46. Abdul Ghofur, Abdul Majid Toyyibi , Lukman Efendi ,(2021), Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wafa Mandiri Surabaya, hasilnya Proses Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra PWK (pelatihan wajib kelompok), PWK dan halmi (halaqoh mingguan) lalu pencairan dana pinjaman. Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri pemberian pembiayaan sistemnya kelompok bukan individu. Persyaratan untuk melakukan pembiayaan yaitu fotocopy ktp dan kartu keluarga dan tidak ada jaminan dalam pembiayaan tersebut.
47. Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahmawan arifin, (2019), Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren, hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan dan Bantuan bisnis yang dilakukan oleh Al-PANSA Micro WAQF Bank memiliki Dampak pada peningkatan jumlah anggota produksi. Ini Peningkatan produksi telah menyebabkan peningkatan pendapatan bisnis dan Keuntungan pelanggan yang kemudian membantu meningkatkan ekonomi Kondisi pelanggan. Meskipun meningkat, kenaikannya belum meningkat secara signifikan.
48. Jehan Maya Zayanie , 2021, Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah memberikan tenggang waktu bagi nasabah yang terdampak covid-19, memberikan penghargaan bagi nasabah yang disiplin, memanfaatkan digitalisasi BWM dengan memberikan edukasi secara virtual atau online pada saat HALMI, mempromosikan produk-produk nasabah melalui e-Commerce dan media sosial, sinergi yang lebih kuat dengan para santri dalam mengembangkan kemampuan dan mengasah kekreatifitasannya, serta memanfaatkan peran kiai untuk menjalin kerja sama dan kepercayaan yang baik kepada suatu lembaga, perusahaan atau perorangan yang berpotensi sebagai donatur

Berdasarkan hasil pembacaan tulisan-tulisan di atas, penulis belum menemukan kajian khusus tentang pengukuran *efisiensi dan efektifitas* Bank Wakaf Mikro di Indonesia sebelum masa pandemic covid-19 dan pada saat pandemic covid -19 yang masih berlangsung saat ini. Kajian tentang efisiensi dan efektivitas yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya belum ada yang mengkaji dari perspektif akuntansi syariah dan maqashid syariah. Untuk metode analisis, selain menggunakan metode DEA, untuk regresi menggunakan data panel, penulis juga menggunakan uji beda *paired sample t test* untuk membandingkan *efisiensi dan efektivitas* Bank Wakaf Mikro sebelum masa pandemic covid-19 dan pada saat pandemic covid -19. Kebaharuan dari penelitian ini juga ada perspektif, dimana penulis akan membahas efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro di Indonesia dari perspektif akuntansi syariah dan menggunakan sudut pandang maqashid syariah dari Ibnu Ashur.

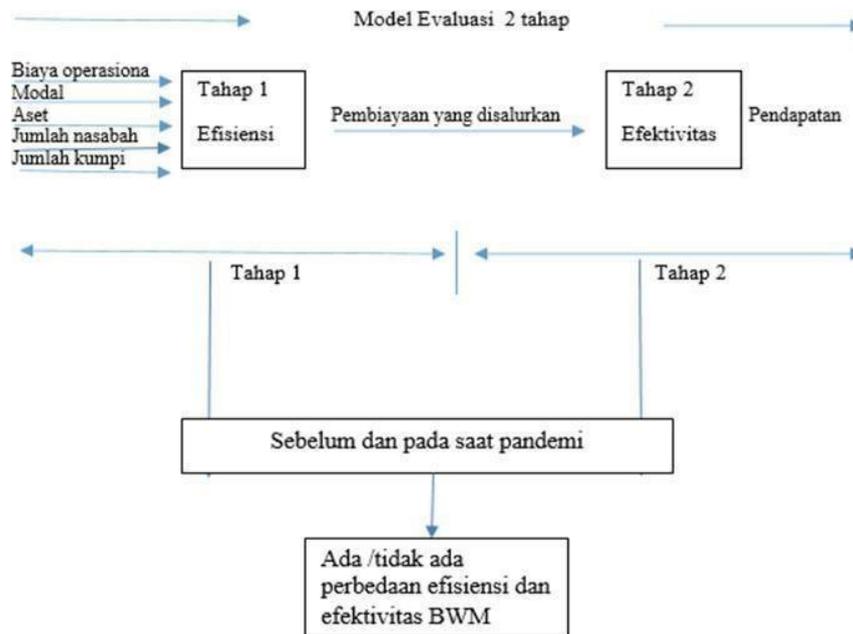
C. Kerangka Pemikiran

Peran utama dari Lembaga Keuangan Mikro adalah memperluas kesempatan ekonomi dan pasar keuangan rakyat miskin dan dianggap sebagai solusi yang efektif dalam mencapai pengurangan kemiskinan dan manfaat sosial ekonomi lainnya..(Li, 2011) Adapun asumsi yang mendasarinya adalah bahwa di antara penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya kesempatan ekonomi, yang dapat dijumpai oleh keuangan mikro (Comim, 2007) .Tolok ukur keberhasilan keuangan mikro terletak pada kinerja aktual yaitu salah satunya adalah keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu lembaga keuangan mikro lahir di penghujung tahun 2017 memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren. Untuk dapat mencapai tujuan dari Bank Wakaf Mikro tersebut maka Bank Wakaf Mikro dituntut harus dapat menjalankan operasional usahanya dengan efisien dan efektif. Dalam agama Islam efisien dan efektif dapat diistilahkan dengan ihsan dan itqan. Ihsan dan Itqan adalah dua istilah yang terdapat dalam Alquran dan sunah yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang

muslim yang harus dilakukannya dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini. Ihsan berarti optimalisasi dalam kebaikan, artinya, kebaikan apapun yang dilakukan seorang Muslim harus selalu optimal dalam persiapan dan pelaksanaannya, agar hasilnya didapat secara optimal pula. Sedangkan, itqan berarti kesungguhan dan kemantapan dalam melaksanakan suatu tugas, sehinggadikerjakannya secara maksimal, tidak asal-asalan, sampai dengan pekerjaan tersebut tuntas dan selesai dengan baik.

Untuk mengukur efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro akan digunakan metode DEA yang dilakukan dengan 2 tahapan seperti yang diusulkan oleh Ho dan Zhu. (ho & Zhu, 2004). Perhitungan efisiensi dan efektivitas Bank Wakaf Mikro didasarkan pada pendekatan intermediasi. Pada tahap I akan dilakukan pengukuran efisiensi Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan variabel input yang terdiri dari Aset, Modal, Beban Operasional, Jumlah Nasabah, Jumlah kumpi yaitu jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren dari Bank Wakaf Mikro. Untuk variabel output digunakan Pembiayaan yang disalurkan. Hasil dari skor efisiensi Pembiayaan yang disalurkan dari tahap I akan diolah pada tahap II ditambah dengan variabel input yaitu deposito sebagai variabel input dimana pada tahap II yang menjadi variabel output adalah pendapatan Bank Wakaf mikro. Kedua tahapan dilakukan terhadap variabel input dan output sebelum dan pada saat terjadinya pandemic covid-19. Dari hasil nilai efisiensi setiap Bank Wakaf Mikro akan diperbandingkan efisiensi dan efektivitasnya antara tahun 2019 saat sebelum pandemi dengan tahun 2020 saat pandemi masih berlangsung. Untuk membuktikan pengaruh variabel input terhadap efisiensi Bank Wakaf Mikro akan digunakan regresi dengan data panel. Untuk melihat perbedaan efisiensi dan efektivitas di kedua waktu tersebut digunakan *uji beda paired sample t test* atau *Uji Wilcoxon*

Berikut ini dapat dilihat gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

